



**OBYEKTIVITAS BERITA PEMILU PRESIDEN PUTARAN
KEDUA TERHADAP PENCALONAN SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO DI SURAT KABAR RAKYAT MERDEKA**

(Studi deskriptif dengan teknik analisis isi tentang
Obyektivitas Berita Surat kabar Rakyat Merdeka mulai tanggal 1
September 2004 sampai dengan 19 September 2004)

TESIS

Oleh :

SANDRA OLIFIA

2002.2.131.0.010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAHID
JAKARTA
2005**



**OBYEKTIVITAS BERITA PEMILU PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TERHADAP PENCALONAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
DI SURAT KABAR RAKYAT MERDEKA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Oleh :

SANDRA OLIFIA

2002.2.131.0.010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAHID
JAKARTA
2005**

ABSTRAK

- A).** Sandra Olifia (NPM: 2002.2.131.0.010).
- B).** **Judul:** Obyektivitas Berita Pemilu Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono Di Surat Kabar Rakyat Merdeka (Studi deskriptif dengan teknik analisis isi mengenai Obyektivitas Berita Surat kabar Rakyat Merdeka mulai tanggal 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004).
- C).** vii, 184 halaman, 3 tabel, 4 bagan, 9 lampiran.
- D).** **Kata Kunci:** Obyektivitas Berita.
- E).** **Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui bagaimana Obyektivitas Berita Pemilu Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono Di Surat Kabar Rakyat Merdeka. **Metode Penelitian:** Analisis Isi. **Hasil Penelitian:** Dari 19 sampel berita mengenai Pemilu Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan SBY, berita yang menerapkan kategori berita tidak mengandung opini wartawan sebanyak 5 sampel atau 26.31 % dari total sampel berita. Untuk berita yang menerapkan kategori berita tidak memihak sebanyak 7 sampel atau 36.85 % dari total sampel. Sedangkan untuk berita yang menerapkan kategori sumber berita disebutkan identitasnya dan kategori relevansi masing-masing sebanyak 19 sampel atau 100 % dari total sampel berita. Dari seluruh sampel berita, ada 3 sampel berita yang menerapkan obyektivitas berita secara sempurna dan ada 16 sampel berita yang tidak menerapkan obyektivitas berita.
- F).** **Buku:** 43 (1957-2003), **Sumber lain:** 9 (1989-2000).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (lebih lanjut, Pemilu), sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dengan permusyawaratan/perwakilan sesuai Konstitusi UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilu yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan parpol harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Oleh sebab itu, *asas luber dan jurdil*, sebagai prasyarat yang telah disepakati, harus dilaksanakan oleh semua organisasi peserta Pemilu secara murni dan konsekuen.

Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada masa sistem pemerintahan negara berdasarkan Demokrasi Parlementer dengan konstitusi UUD Sementara 1950. Pasal 35, jo. pasal 57, jo. pasal 135 ayat (2) UUD Sementara 1950 menyebutkan perlunya undang-undang dalam penyelenggaraan Pemilu. Program penyelenggaraan Pemilu sudah dicanangkan pada masa Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951). Akan tetapi, Pemilu baru terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus

1955-3 Maret 1956). Pelaksanaan Pemilu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Parlemen (DPR), dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. DPR hasil Pemilu 1955 berjumlah 272 orang (setiap anggota didukung oleh 300.000 suara) yang diikuti oleh 28 partai politik (parpol). Ada 4 parpol yang memperoleh suara mayoritas, yaitu Masyumi (60 wakil), PNI (58 wakil), NU (47 wakil), dan PKI (32 wakil). Keempat partai ini menjadi empat fraksi di DPR. Selain keempat fraksi ini ada lima belas fraksi yang lain, yakni: Fraksi Nasional Progresif, Fraksi Pendukung Proklamasi, Fraksi PSII, Fraksi Parkindo, Fraksi Katolik, Fraksi PSI, Fraksi Perti, Fraksi Gerakan Pembela Pancasila, Fraksi P3RI, Fraksi Perorangan AKUI, Fraksi PPTI, Fraksi PIR Hazairin, Fraksi Persatuan yang wakili daerah Irian Barat.

Orde Baru lahir dengan tekad ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam bidang ketatanegaraan, banyak ditempuh upaya-upaya konstitusional untuk menyelesaikan kehidupan politik kenegaraan serta produk peraturan perundang-undangan yang tidak sejiwa dan senapas dengan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan Pemilu selama Orde Baru telah berlangsung sebanyak enam kali. Pemilu pertama Era Orde Baru (kedua di Indonesia) dilaksanakan pada 3 Juli 1971 dengan Sistem Gabungan secara mengejutkan

memunculkan Golongan Karya (Golkar) sebagai peserta Pemilu yang memperoleh suara terbanyak (227 kursi), kemudian diikuti NU (58 kursi), Parmusi (24 kursi), PNI (20 kursi), PSI (10 kursi) dan partai-partai lain di bawah 10 kursi. Kemenangan Golkar mempunyai dampak dalam pembentukan Kabinet II. Dalam kabinet hanya terdapat dua orang menteri yang berasal dari partai politik, yakni Mintaredja (Menteri Sosial) dan Sunawar Sukowati (Menteri Kesejahteraan).

Pemilu kedua pada 4 Mei 1977 dengan Sistem Gabungan, diikuti hanya dua partai politik merupakan fusi (peleburan) dari beberapa partai politik yang seideologi ditambah dengan satu Golongan Karya (Golkar). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdiri pada tanggal 5 Januari 1973 dengan lambang Ka'bah. PPP merupakan fusi dari Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) dan Partai Syarikat Islam (PSII). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dengan lambang Kepala Banteng. PDI merupakan fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Golongan Karya berdiri pada tanggal 20 Januari 1964 dengan lambang Pohon Beringin. Golongan Karya merupakan golongan fungsional yang berdasarkan UU No. 80/1958 terdiri dari: buruh dan pegawai,

tani, pengusaha nasional, alim-ulama, angkatan Proklamasi 17 Agustus 1945 (Angkatan 45) dan angkatan jasa. Penyederhanaan OPP dari 9 partai menjadi 2 parpol dan 1 Golkar, kemudian dituangkan dalam UU No. 3/1975 tentang "Partai Politik dan Golkar". Dalam UU tersebut baik parpol maupun Golkar harus berasaskan Pancasila. Dengan penyederhanaan tersebut, pemerintah berharap agar persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional terpelihara serta percepatan pembangunan nasional terlaksana.

Pelaksanaan Pemilu Ketiga pada 2 Mei 1982 diikuti oleh 27 Propinsi, karena integrasi Timor Timur ke Indonesia sehingga mempengaruhi pembagian kursi di DPR dan MPR. Tapi secara yuridis belum mengubah jumlah kursi yang tersedia di kedua badan perwakilan tersebut.

Pemantapan terhadap Parpol dan Golkar dengan dikeluarkannya UU No. 3/1985 sebagai penyempurnaan dari UU No. 3/1975, semakin memperjelas bahwa Parpol dan Golkar telah berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula berlambang Ka'bah, kemudian diganti dengan lambang Bintang.

Pemilu keempat dilaksanakan pada 23 April 1987 dengan Sistem Gabungan. Pemilu kelima pada 6 Juni 1992 dengan Sistem

Gabungan dan Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997 dengan Sistem Proporsional berdasarkan Stesel Daftar.

Pemilu selama Orde Baru, yang berdasarkan UUD 1945, dan landasan operasionalnya tetap mengacu pada UU No. 15/1969 dan UU No. 16/1969. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan jaman. Namun, perubahan-perubahan itu tidaklah mengubah secara mendasar pikiran, tujuan, asas, dan sistem Pemilu itu sendiri.

Fakta memperlihatkan, bahwa selama Pemilu Orde Baru Golkar selalu dominan. Dalam Pemilu 1971 Golkar meraih 62,8%, tahun 1977 mendapat 62,1%, tahun 1982 memenangkan 64,3%, dan tahun 1987 mencapai 73,2%. Pada Pemilu tahun 1992, Golkar memenangkan 68,1%, dan menjadi 70,2% pada Pemilu 1997.

Pelaksanaan Pemilu di Era Reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1999, benar-benar merupakan angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan. Terutama berkaitan dengan penerapan asas Pemilu selain LUBER juga JURDIL. Beberapa indikator pelaksanaan Pemilu yang demokratis di Era Reformasi antara lain disebabkan penyelenggaraan Pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari unsur partai politik (parpol) yang merupakan sejumlah wakil peserta

pemilu dan pemerintah sebanyak 5 wakil, pelaksanaan Pemilu dilaksanakan pada hari Minggu atau diliburkan oleh pemerintah (melalui Keppres), diikuti oleh 48 partai politik (multi partai) dengan asas yang berbeda-beda (asal tidak bertentangan dengan Pancasila) berdasarkan Kepmendagri/Ketua KPU No. 3/1999, PNS tidak dibenarkan menjadi pengurus parpol atau menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu (PP No. 5/1999 dan PP No. 12/1999), pejabat negara/menteri yang menjadi pengurus parpol tidak dibenarkan menjadi juru kampanye (harus cuti), dan kehadiran pengawas pemilu (panwaslu) yang mampu menjamin pemilu agar tetap jujur. (Budiyanto, 2000:182)

Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem Demokrasi Pancasila adalah melalui Pemilu. Sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1999, Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat dilakukan melalui perwakilan dari partai-partai. Tetapi, untuk Pemilu tahun 2004, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan cara baru untuk memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat tersebut yakni pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat.

Untuk kali pertama, Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat dirasakan lebih demokratis dimana rakyat memiliki kesempatan yang sebebaskan untuk memilih langsung presiden dan

wakil presiden serta para wakil rakyat sesuai dengan keinginan dan hati nurani mereka.

Pemilu untuk periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap pertama untuk memilih para calon anggota legislatif yang berlangsung pada 5 April 2004. Pemilihan para calon anggota legislatif ini dilakukan untuk memilih putra-putri daerah masing-masing dari daerah tersebut.

Tahap kedua untuk memilih Calon Presiden (lebih lanjut, Capres) dan Calon Wakil Presiden (lebih lanjut, Cawapres) yang berlangsung pada 5 Juli 2004. Tahap ini dikenal sebagai Pemilu Presiden Putaran Pertama dalam memilih Capres dan Cawapres. Ada lima pasangan Capres dan Cawapres yang maju dalam putaran pertama yakni Wiranto dan Solahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, Amin Rais dan Siswono Yudohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar.

Tahap ketiga untuk memilih Capres dan Cawapres yang berlangsung pada tanggal 20 September 2004. Tahap ini dikenal sebagai Pemilu Presiden Putaran Kedua dalam memilih Capres dan Cawapres. Ada dua pasangan yang berhasil maju dalam putaran kedua ini, yakni pasangan Megawati Soekarnoputri dan

Hasyim Muzadi (lebih lanjut, Mega-Hasyim) serta pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (lebih lanjut, SBY-JK).

Sistem pemilihan Capres dan Cawapres kali ini berbeda dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Capres yang berhak menjadi presiden langsung apabila pada putaran pertama, calon tersebut mendapatkan lima puluh persen suara yang memilih, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika belum ada yang mendapatkan lima puluh persen suara, maka akan diadakan pemilihan ulang.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 48 Tahun 2004 menyatakan bahwa tidak semua calon presiden berhak mengikuti putaran berikutnya. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 67, ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, yang menyatakan “bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden”.

Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (lebih lanjut, SBY) dalam Pemilu Presiden memiliki keunikan tersendiri, dimana persaingan yang terjadi adalah Partai Demokrat sebagai partai baru dan diperkirakan memiliki pendukung yang sedikit dengan PDI Perjuangan sebagai partai lama dan memiliki pendukung yang besar.

Selain itu, SBY memiliki latar belakang militer yang dianggap berseberangan sikap dengan rakyat sejak Kasus Semanggi tahun 1998. Kasus Semanggi dianggap sebagai hasil dari kecongkakan militer. Selain rakyat, media massa pun menyudutkan pasangan yang berlatar belakang militer.

Dalam Pemilu Putaran Pertama, persaingan untuk mendapatkan simpati rakyat oleh kelima pasangan Capres lebih banyak dilakukan dengan cara berkampanye, langsung mendatangi daerah-daerah untuk bertemu dan bertatap muka dengan para pendukungnya. Tetapi, dalam Pemilu Putaran Kedua pasangan Capres dalam berkampanye lebih banyak melakukan dengan cara menggunakan media massa melalui dialog dan debat untuk mengutarakan visi dan misi serta program-program kerja yang akan dilakukan kedua pasangan bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Kampanye yang dilakukan para pasangan Capres melalui media massa cetak maupun elektronik dirasakan lebih efektif dibanding dengan langsung bertemu ke daerah-daerah. Media massa memiliki fungsi, salah satunya adalah mempengaruhi pendapat (opini) masyarakat yang efeknya terhadap penentuan pemilihan Capres sangatlah besar. Selain itu, pengaruh media massa sebagai pers sangat besar terhadap perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Terbukti melalui pendapat (opini)

publik yang terbentuk akibat berita dapat merubah wacana dan emosional rakyat Indonesia.

Peranan media massa saat ini dirasakan sangat penting dalam kehidupan politik. Laporan peristiwa-peristiwa politik sebagai bagian aktivitas media sering memberi dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan politik. Peranan media itu sendiri bukan hanya sebagai sumber informasi politik saja tetapi juga sering kali menjadi faktor pendorong (*trigger*) terhadap terjadinya perubahan politik. Efektivitas suatu media untuk suatu perubahan politik memerlukan situasi kondusif dengan adanya keterbukaan politik. Salah satu indikator adanya keterbukaan politik adalah pers yang bebas. Pers yang bebas juga dapat merangsang terjadinya kebebasan politik. Pemberitaan-pemberitaan politik yang aktual dan kritis dapat memberi kesadaran pada masyarakat tentang perlunya sistem politik yang demokratis.

Banyak aspek dari media yang membuat dirinya penting dalam kehidupan politik. Salah satunya adalah keterkaitan antara media satu dengan media lainnya dalam pemberitaan politik sehingga membentuk rantai informasi yang merupakan kekuatan media dalam penyebaran informasi politik dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik. Media memegang peranan sangat penting dalam komunikasi politik (pengembangan opini

publik) oleh karena itu media sering terlibat dalam pembuatan wacana politik. Dalam komunikasi politik, media acapkali tidak hanya bertindak sebagai saluran yang menyampaikan pesan politik melainkan juga sebagai agen politik. Jika sebuah media sudah menjadi agen politik maka persoalan obyektivitas dalam pemberitaan politik menjadi hal yang krusial. Apalagi, salah satu karakteristik utama berita politik itu sendiri adalah pembentukan opini publik.

Dengan menjadi saluran politik saja, media bisa menyumbang pada pembentukan opini publik apalagi bertindak sebagai agen.

Eriyanto (2001:32) berpendapat bahwa media massa adalah agen pembentuk wacana ekonomi politik yang paling canggih dan absah. Berbagai perdebatan di masyarakat, ditampilkan kembali oleh media dalam bentuk yang sudah dikemas. Hasil kemasan media, selalu tidak pernah netral, menyusup ideologi kelas yang berkuasa, akhirnya menjadikan media sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan kelas yang berkuasa

Di era reformasi, ketika pers telah mendapatkan kebebasannya, seharusnya mereka bisa bersikap independen. Independen yang dimaksud adalah pers terbebas dari pihak manapun dalam membuat berita, termasuk para penguasa dalam

menyusupkan ideologinya. Kebebasan pers berarti demokratisasi, begitu pula sebaliknya, demokratisasi berarti kebebasan pers.

Membicarakan hubungan media dengan demokratisasi, terasa kian penting dan relevan. Ada beberapa hal yang mendasari pemikiran ini, Dedy Djamaluddin Malik menyatakan:

Pertama, media merupakan salah satu aktor politik yang secara massif, serempak dan rutin terus melakukan sosialisasi politik terhadap kelompok pembaca dan pemirsanya yang bersifat heterogen. Dalam waktu yang lama, tentu saja terpaan media (*media exposures*), ini akan membentuk persepsi, sikap dan perilaku politik tertentu. Dengan demikian, kesadaran politik dan partisipasi politik berbagai kelompok masyarakat, akan terus terbentuk lewat dukungan komunikasi bermedia.

Kedua, makin besarnya kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat dewasa ini, kian didukung oleh tersedianya banyak media beserta alternatif isi yang disajikannya. Maraknya industri media, khususnya yang datang belakangan seperti televisi swasta, dan media interaktif lainnya seperti internet misalnya, telah memungkinkan tumbuhnya pluralisme gagasan, diskusi publik dan keanekaragaman sumber untuk mengakses informasi. Itu berarti, demokratisasi telah terjadi secara massif.

Ketiga, keanekaragaman sumber pesan, bisa melahirkan publik-publik politik baru yang heterogen. Orientasinya, aspirasi dan visi politiknya pun saling serbaneka. Akibatnya masyarakat makin menjadi tersegmentasi dan mengalami fragmentasi dalam ruang-ruang politik baru. Bila demikian, kemungkinan terjadinya ketegangan dan konflik politik pun bakal lebih kental. Berbarengan dengan hal itu, figur-figur politik baru yang mempersentasikan tiap kelompok, bermunculan guna membentuk lingkungan simboliknya sendiri, sehingga akses mereka terhadap *political resources* (kekuasaan) lebih terbuka.

Keempat, sejalan dengan berkembangnya industri media, peningkatan ekonomi dan pendidikan telah melahirkan kelompok-kelompok profesional baru yang hidupnya amat bergantung pada informasi. Kelompok profesional ini, atau yang sering dijuluki kelompok menengah, sangat berkepentingan dengan perlunya hak memperoleh informasi (*the right to communicate*) yang lebih terbuka dan beraneka ragam. Karena

suasana kehidupan yang makin demokratis merupakan tuntutan mereka mendesak.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam waktu yang lama, media akan merubah persepsi masyarakat yang heterogen, dan menimbulkan kesadaran politik. Hal ini didukung dengan semakin maraknya media massa, baik cetak maupun elektronik. Keanekaragaman sumber pesan dapat membuat masyarakat yang heterogen secara alami tersegmentasi. Ini membuat situasi dan kondisi bernegara semakin rentan akan konflik.

Mark Fishman dalam bukunya *Manufacturing News* seperti dikutip Eriyanto (2002:100-101) berpendapat bahwa ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dapat dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*).

“Dalam bentuknya yang umum pandangan seleksi berita (*selectivity of news*) seringkali melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Intinya, proses berita adalah proses seleksi. Sedangkan dalam pendekatan pembentukan berita (*selectivity of news*), peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi melainkan

dikreasi oleh wartawan”, demikian pendapat Eriyanto (2002:100-101).

Hubungan antara bidang politik dan interaksinya dengan masyarakat umum sangat kompleks. Dalam sistem politik termasuk sistem politik Indonesia, para politisi sebagai pembuat keputusan politik, selalu berkomunikasi dengan warga negara. Sarana komunikasinya adalah media.

Dalam masyarakat modern manapun media memainkan peran penting untuk perkembangan politik masyarakatnya. Dalam kenyataannya pers adalah salah satu pilar demokrasi. Kebebasan berekspresi dan berinformasi merupakan dasar penting untuk sistem demokrasi dan telah dikukuhkan dalam semua dokumen hak asasi manusia yang dikeluarkan setelah Perang Dunia II.

Media telah menjadikan Pemilu sebagai obyek liputan (utama). Pada era reformasi untuk membuat media massa tidak lagi diperlukan SIUPP. Yang berarti kebebasan pers terbuka selebar-lebarnya, melahirkan fenomena liputan politik (Pemilu) yang sama sekali berbeda dari jaman Orde Baru. Liputan Pemilu diserahkan sepenuhnya kepada media masing-masing, baik format, ruang, maupun isi.

Kebebasan media biasanya dilindungi oleh undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan memberi informasi kepada masyarakat. Fungsi media dalam demokrasi

berlipat ganda. Mereka melaporkan fakta dan memberi informasi, mendidik publik, memberi komentar, menyampaikan dan membentuk opini, karena itu memberikan sumbangan terhadap debat dan opini publik.

Lebih jauh lagi, media mengkritik, mengatur, dan “mengontrol” pemerintah (termasuk polisi dan militer) serta pegawai negeri dan semua pelaku politik, kader partai terpilih, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendeknya semua orang yang beraksi dalam lingkup publik.

Beberapa pakar mengatakan bahwa media sebagai pembantu yang melayani publik dan media sebagai kekuatan keempat dalam negara. Dalam hal ini terdapat empat model yang berbeda yang menjelaskan media sebagai kekuatan keempat, yang berhubungan dengan publik. Keempat model yang berbeda untuk menjelaskan hubungan ini dikemukakan Friedrich-Stiftung (2000:10) yaitu:

1. Model dari atas ke bawah: model ini mengasumsikan bahwa pelaku politik dalam partai, parlemen, dan pemerintah mempengaruhi dunia melalui keputusan mereka. Umpan balik yang muncul diambil oleh pelaku politik, digunakan untuk memformulasikan agenda politik, lalu dikomunikasikan kepada media.
2. Model demokrasi media: model ini mengimplikasikan bahwa media itu sendiri yang menentukan opini publik sampai tingkat tertentu dan karena itu mempengaruhi agenda politik. Media menyerap umpan balik setelah munculnya keputusan politik, dan mengembalikannya kepada politisi dan publik.

3. Model bawah ke atas: model ini mengatakan bahwa publik itu sendiri warga negara, pemilih, rakyat menyerap problem dari dunia nyata, lalu menentukan opininya. Opini itu pada gilirannya dipengaruhi opini publik yang telah dipublikasikan. Publik menentukan opini dan keputusan politisi serta partai mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media.
4. Model Biotipe: model ini mengasumsikan bahwa dalam dunia nyata segala sesuatu saling bergantung. Model ini dapat dilihat sebagai penggabungan dari ketiga model di atas. Ada hubungan erat antara politisi dan jurnalis, semacam hubungan barter yang memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan mengakibatkan saling ketergantungan untuk jangka panjang. Simbolis kadang menunjukkan fenomena yang aneh: baik politisi maupun jurnalis seperti lalat yang memadu kasih dan saling mengeluarkan dengung. Begitulah yang tampak ketika politisi dan jurnalis “memadu kasih”. Mereka muncul di televisi dengan tata warna dan suara yang indah sementara publik menyaksikan tidak bersuara.

Jika dilihat dari beberapa model di atas, penulis menyimpulkan bahwa media dan politisi bisa mempengaruhi, bahkan mereka bisa menjadi partner yang serasi dalam membuat opini publik. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat akan menjadi “pengabdian setia” negara jika mereka tidak memiliki pendidikan untuk mencerna isi pernyataan media tersebut.

Sampai akhir-akhir ini proses pembentukan opini politik sangat dipengaruhi, bahkan didominasi oleh partai politik itu sendiri. Media hanya sebagai alat untuk mempropagandakan pernyataan pemerintah atau partai politik dalam mengkampanyekan program-programnya.

Pasca reformasi, kita menyaksikan media cetak maupun elektronik membuat ragam rubrik atau program acara mengenai politik. Rubrik khusus tentang Pemilu disediakan media cetak untuk memberikan uraian yang lebih rinci dan mendalam mengenai perkembangan Pemilu yang sedang berlangsung setiap hari. Hampir semua surat kabar berskala nasional maupun surat kabar daerah menyediakan suplemen dan kegiatan kampanye.

Atas dasar kenyataan ini, wajarlah jika kemudian publik sering menyoroti pemberitaan politik; apalagi pada saat-saat krusial dalam kehidupan politik seperti masa kampanye Pemilu, sedang terjadi krisis politik, atau konflik antar pendukung partai. Dalam situasi krisis seperti itu, publik ingin tahu mengenai perlakuan masing-masing media terhadap peristiwa dan aktor politik yang terlibat dalam peristiwa itu; apakah proporsional atau memihak salah satu pihak. Karenanya dalam pemberitaan harus memperhatikan obyektivitas suatu berita.

Riyati Irawan dan Teguh Meininda (1981:13) mengatakan, “Syarat-syarat dari pada suatu berita adalah: cepat, lengkap, obyektif, serta baik susunannya”.

Persaingan ketat di antara media massa, menuntut institusi surat kabar menciptakan berbagai macam cara dalam pemberitaan, demi merebut pangsa pasar pembaca, dari obyektif hingga subyektif, dari yang sehat sampai tidak sehat.

Indria Samego (2000:2) berpendapat bahwa dalam situasi yang begitu kompleks seperti sekarang dan tantangan pers sendiri yang sangat dilematis, persaingan di dalam merebut pasar berita menjadi salah satu manifestasi yang tidak dapat dihindari masyarakat pers. Ada kecenderungan di kalangan mereka seolah-olah berita apapun halal untuk disebarluaskan.

Seringkali media massa melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang didalamnya juga mengatur etika pemberitaan.

Onong Uchjana Effendy (2000:308) mengatakan, “Seorang komunikator media massa harus berfikir secara konseptual dan bertindak secara sistemik dan sistematis. Ia harus menyadari bahwa komunikasi yang ia geluti bersifat paradigmatik”.

Pada faktanya setiap berita yang disiarkan akan menimbulkan paradigma baru bagi khalayaknya berdasarkan ideologi media tersebut. Berita nasional pada umumnya dan berita politik pada khususnya, memang merupakan target pemberitaan surat kabar, hal ini yang menjadi perhatian publik untuk selalu diikuti perkembangannya karena hubungannya dengan kehidupan bernegara secara luas dikemudian hari.

Independen dan obyektif, merupakan dua kata kunci yang menjadi kiblat dan klaim setiap jurnalis di seluruh dunia. Seorang jurnalis selalu menyatakan bahwa dirinya telah bertindak obyektif,

seimbang, dan tidak berpihak pada kepentingan apa pun kecuali keprihatinan atas hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

Meskipun sikap independen dan obyektif menjadi kiblat setiap jurnalis di seluruh dunia, dalam permasalahan yang sama, pada kenyataannya kita sering kali mendapatkan suguhan berita yang beraneka warna dari sebuah peristiwa yang sama. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, media tertentu memberitakannya dengan cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup sisi/aspek tersebut, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa di balik jubah kebesaran independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan paradoks, tragedi, dan bahkan ironi.

Dengan membandingkan beberapa pemberitaan di media, sangat mungkin kita akan menemukan kesimpulan yang setara, bahwa media apa pun tidak bisa lepas dari bias-bias, baik yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama.

Eriyanto (2000:86) mengutip pendapat Merrill bahwa obyektivitas jurnalistik itu mustahil, katanya semua kerja jurnalistik pada dasarnya adalah subyektif. Dari pencarian berita, peliputan, penulisan, sampai dengan editing berita. Nilai-nilai subyektif wartawan ikut memberi pengaruh dalam semua proses

jurnalistik. Kenapa sesuatu peristiwa diliput, siapa yang diwawancarai, apa yang ditanyakan, kemana kecenderungan berita ditulis, bagian mana yang ditonjolkan, semua proses tersebut memerlukan pertimbangan subyektif.

Penulis memahami pendapat Merril bahwa tidak ada berita yang obyektif, walaupun berita itu sudah memenuhi syarat dalam beberapa hal, seperti *Cover both side*, dan faktual yang berarti bahwa penulisan berita berdasarkan nara sumber berimbang dan baru saja terjadi. Faktanya adalah ketika dalam proses pencarian berita, peliputan, penulisan, dan *editing*, walau ideologi sebuah media dan subyektif jurnalis bermain, asalkan sesuai dengan fakta yang terjadi dan memenuhi standarisasi penulisan, maka berita tersebut dianggap obyektif.

Fakta bahwa media massa, seperti surat kabar sekarang ini menjadi sarana yang efektif untuk melakukan pendekatan yang dilakukan para Capres, baik hanya untuk memperkenalkan diri maupun visi dan misi yang akan diterapkan di pemerintahan selanjutnya. Pada akhirnya, menimbulkan persepsi dan sikap mengenai siapa di antara Capres tersebut yang akan dipilih.

Tetapi, berita Pemilu yang dimuat dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat memberikan informasi yang lengkap dan luas mengenai Pemilu, terutama yang berkaitan langsung dengan para

Capres serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Sedangkan, dampak negatifnya yaitu banyak surat kabar yang menyajikan berita tidak seimbang dan mengandung sifat mendukung atau keberpihakkan.

Intensitas dan penyajian berita dari Capres tersebut akan berpengaruh terhadap persepsi dan sikap yang timbul di kalangan masyarakat, apakah itu baik atau buruk. Karena semakin sering salah satu Capres dimuat atau diberitakan maka akan semakin mudah dikenal masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya tujuan-tujuan tertentu atau aspek kepentingan dari pengelola media dengan salah satu Capres.

Penulis ingin meneliti Surat kabar Rakyat Merdeka mengenai obyektivitas berita. Alasan penulis memilih Surat kabar Rakyat Merdeka karena adanya kecenderungan lebih banyak memuat berita kampanye yang dilakukan oleh Capres, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan Capres, Megawati Soekarnoputri.

Surat kabar Rakyat Merdeka yang diterbitkan PT Wahana Ekonomi Semesta dengan SK. Menpen/Dirjen PPG No. 88/Ditjen PPG/K/1999, beralamat di Jl. Kebayoran Lama No. 17, Jakarta Selatan 12210, dengan jumlah 20 halaman. Surat kabar Rakyat Merdeka memuat berita politik, ekonomi, kriminal, hukum,

pendidikan, olahraga, dan hiburan. Selain itu juga terdapat rubrik tetap dan rubrik tidak tetap.

Tim Sekretariat Redaksi Rakyat Merdeka (2001:1) mengatakan bahwa “Surat kabar Rakyat Merdeka memang berbeda dengan surat kabar lainnya terutama menyangkut judul beritanya yang dianggap “semau gue”, surat kabar dinilai sebagai koran provokator, tukang kompor, tidak sesuai dengan isi beritanya, dan bisa menimbulkan kerusuhan”.

Lebih lanjut, Tim Sekretariat Redaksi Rakyat Merdeka (2001:2) mengatakan bahwa Surat kabar Rakyat Merdeka lebih dikenal sebagai koran politik (tanpa meninggalkan berita hiburannya), selalu tampil dengan berita-beritanya yang keras sehingga tak salah jika kemudian Koran Rakyat Merdeka menempatkan dirinya sebagai koran oposisi yang siap mengkritik siapapun yang berkuasa kalau kebijakan-kebijakannya sangat merugikan rakyat banyak.

Surat kabar Rakyat Merdeka memuat berita-berita politik diantaranya, berita Pemilu Presiden Putaran Kedua.

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai Obyektivitas Berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka.

Pemilu Presiden Putaran Kedua ditetapkan tanggal 20 September 2004 dengan Capres, Megawati Soekarnoputri

(selanjutnya disebut Megawati) dan Capres, Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disingkat SBY).

Penulis melakukan penelitian mulai tanggal 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004. Penulis menganggap bahwa rentang waktu tersebut adalah masa yang paling hangat dan terlihat besarnya persaingan yang terjadi di antara kedua Capres dalam merebut simpati dari masyarakat untuk mencari dukungan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Sejauhmana Obyektivitas Berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat Kabar Rakyat Merdeka” (Studi deskriptif dengan teknik analisis isi tentang Obyektivitas Berita Surat kabar Rakyat Merdeka mulai tanggal 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004)

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Sejauhmana Obyektivitas Berita Pemilihan Umum Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bamabang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan di bidang jurnalistik tentang penulisan berita secara obyektif.

Manfaat Praktis, memberi masukan kepada redaksi Surat kabar Rakyat Merdeka dalam penulisan berita secara obyektif dan benar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual

Masalah pokok penelitian adalah Sejauhmana Obyektivitas Berita Pemilihan Umum Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka?

Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam masalah pokok penelitian ini, yaitu:

1. Surat kabar
2. Berita
3. Obyektivitas Berita

1. Surat kabar

Kurniawan Junaedhi (1991:137), dalam Ensiklopedi Pers Indonesia mengatakan bahwa surat kabar berupa harian atau mingguan yang tidak mempunyai gambar kulit (*cover*) yang terbuat dari jenis kertas lain. Terdiri dari beberapa halaman yang memiliki antara 7-9 kolom. Isinya mengenai informasi sehari-hari.

Lebih lanjut mengenai definisi surat kabar, Kurniawan Junaedhi (1991:257) mengatakan:

Sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa cetak, berupa lembaran berisi berita-berita, karangan-karangan dan iklan, dan diterbitkan secara berkala, bisa harian, mingguan, bulanan serta diedarkan secara umum. Isinya harus aktual. Juga harus bersifat universal, maksudnya pemberitaannya harus bersangkutan-paut dengan manusia dari berbagai golongan dan kalangan. Menurut jenisnya dibagi, surat kabar harian dan surat kabar berkala (mingguan, dwi mingguan, bulanan, dan seterusnya). Juga dapat digolongkan menjadi surat kabar khusus, surat kabar umum ...”.

Mengenai surat kabar, Riyati Irawan (1981:35) mendefinisikan sebagai barang cetakan yang berisi berita-berita aktual yang terbit secara kontinyu.

Dja'far H. Assegaff (1991:140) mengatakan, “surat kabar adalah penerbitan berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan-karangan dan iklan, yang dicetak dan terbit secara tetap atau periodik dan dijual secara umum”.

E. H Tambunan (1977:31) mengatakan bahwa surat kabar memberikan informasi dan berusaha menyuguhkan para pembacanya dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, baik berita yang sudah lalu dan juga yang akan datang termasuk didalamnya advertisi (iklan).

F. Sitanggang (1999:161) dalam bukunya Persuratkabaran Indonesia dalam Era Reformasi mengatakan:

Surat kabar merupakan media komunikasi yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Masyarakat pembacanya meliputi berbagai golongan dan lapisan yang jumlahnya cukup besar, lain halnya dengan majalah, penyebarannya terbatas pada kalangan tertentu, isinya mempunyai kekhususan. Sedangkan koran, berita dan artikel yang sifatnya umum meliputi berbagai aspek kehidupan seperti: sosial, budaya, dan sebagainya.

Surat kabar itu media komunikasi massa yang memuat serba-serbi pemberitaan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, demikian pendapat YS. Gunadi (1998:112)

Onong Uchjana Effendy (2003:154-155) mengemukakan ciri-ciri surat kabar adalah:

Publisitas: ialah bahwa surat kabar diperuntukan umum; karenanya berita, tajuk rencana, artikel dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum.

Universal: menunjukkan bahwa surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia.

Aktualitas: ialah kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Aktualitas ini merupakan faktor yang amat penting karena menyangkut persaingan dengan surat kabar lain dan berhubungan dengan nama baik surat kabar yang bersangkutan.

Lebih lanjut Onong Uchjana Effendy (2003:155) menyatakan bahwa selain ketiga ciri tersebut, terdapat ciri lain dari surat kabar, yaitu *periodisitas* yang berarti suatu penerbitan disebut surat kabar, jika terbitnya secara periodik, teratur. Tidak

menjadi soal apakah terbitnya itu sehari sekali, seminggu sekali, sehari dua kali atau tiga kali seperti di negara-negara yang sudah maju, tetapi syaratnya harus teratur. Ciri ini tidak terlalu erat hubungannya dengan jurnalistik.

Sedangkan surat kabar menurut Karl Baschwitz, seperti dikutip A.M. Hoeta Soehoet (1982:46) harus memiliki ciri sebagai berikut:

Publisitas: isinya harus terbuka bagi siapa pun juga, jadi tidak hanya untuk orang atau golongan tertentu saja.

Periodisitas: terbitnya harus teratur waktunya, kalau harian harus terbit setiap hari, kalau mingguan harus terbit setiap minggu.

Universalitas: isinya harus meliputi semua persoalan, tidak hanya mengenai persoalan tertentu saja, umpamanya mengenai pertanian saja.

Aktualitas: isinya harus aktual, artinya kalau pernah dimuat sebelumnya, para pembaca umumnya belum mengetahuinya.

Kontinuitas: berita-berita mengenai peristiwa yang masih sedang berlangsung harus dimuat beritanya, dan penerbitannya juga harus kontinu, artinya tidak sebentar-bentar berhenti terbit.

Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa Onong Uchjana Effendy melihat ciri surat kabar kepada publisitas, universalitas, dan aktualitas. Sedangkan, Karl Baschwitz melihat kelima syarat harus dipenuhi oleh suatu yang disebut surat kabar.

Baschwitz dan Onong Uchjana Effendy dalam memberi batas pengertian pada ciri-ciri surat kabar terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut dapat dilihat pada ciri

publisitas dan universalitas, hanya saja mereka berbeda cara pengungkapan, pemilihan kata dan penempatannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada ciri aktualitas. Bachwitz lebih tegas dan jelas dari pengertian yang diungkapkan Onong Uchjana Effendy. Demikian pula ketegasan dan kejelasan Bachwitz mengenai pengertian periodisitas.

A.M Hoeta Soehoet (2003:9) mengemukakan ada lima ciri-ciri surat kabar, yaitu:

1. Publisitas artinya surat kabar tersebut diterbitkan untuk publik, untuk masyarakat umum, untuk siapa saja. Jadi siapa saja boleh membelinya, membacanya. Isinya ditujukan agar diketahui masyarakat umum.
2. Periodisitas artinya surat kabar tersebut terbit pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Periode terbit, jarak waktu antara dua terbitan bersifat tetap dan teratur.
3. Aktualitas artinya isinya aktual, belum pernah dimuat sebelumnya. Isi surat kabar terdiri dari bidang redaksi dan isi bidang perusahaan. Isi bidang redaksi merupakan hal-hal yang hangat (baru/aktual).
4. Universalitas artinya isinya universal, tidak mengenai satu persoalan saja.
5. Kontinuitas artinya isinya berkesinambungan.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pers dan pemerintah yang sama-sama mengabdikan kepada masyarakat itu, hal itu hanya disebabkan oleh interpretasi yang tidak sama. Bagaimana pun, pers yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan idealisme -yang harus dimilikinya- harus dan akan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah

meskipun kebenarannya bersifat relatif. Dalam hubungan ini adalah argumentasi.

Di negara merdeka, pers memiliki idealisme tidak berarti harus menentang pemerintah untuk membela masyarakat. Oleh karena itu, idealisme yang disandang oleh pers berarti pula harus mendukung pemerintah; kalau perlu memuji pemerintah, tetapi tetap dengan argumentasi sebagaimana disinggung di atas.

Onong Uchjana Effendy (2003:149) menambahkan ciri pers dalam hal ini pers sebagai berikut: “Dalam hubungan inilah pers sebagai wakil masyarakat dengan “kekuasaannya” itu mengawasi tindakan lembaga pemerintah dengan memberikan peringatan jika ternyata tidak sesuai atau menyimpang dari konstitusi. Demikianlah pengertian beserta ciri-ciri pers ditinjau secara umum”.

Bila dikaitkan dengan masalah penelitian, maka Rakyat Merdeka merupakan surat kabar karena berupa lembaran tercetak, memiliki 7-9 kolom dan tidak memiliki gambar kulit (*cover*), terbit secara berkala, berisi berita-berita dan iklan yang aktual dan universal serta menarik perhatian pembacanya. Surat kabar tersebut memiliki ciri publisitas, aktualitas, periodisitas, kontinuitas, dan universalitas.

2. Berita

Berita mempunyai kedudukan paling penting dalam kegiatan jurnalistik yang perannya merupakan cerminan realitas sosial dalam masyarakat.

Berita menurut William S. Maulsby dalam bukunya *Getting the News* yang dikutip Dja'far H. Assegaff (1991:24) yakni “Suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti yang penting dan baru terjadi, yang dapat *menarik perhatian* para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut”.

Lebih lanjut, Dja'far H. Assegaf (1991,24) mendefinisikan berita sebagai “*Laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena ia luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi **human interest** seperti humor, emosi, dan ketegangan*”.

Menurut Mitchell V. Charnley (1979:34), “News is timely report of fact or opinion that hold interest or importance, or both, for a considerable number of people”.

Penulis menerjemahkan dan memahami pendapat di atas bahwa berita adalah laporan hangat tentang fakta atau pendapat yang menarik atau penting, atau keduanya bagi sebagian besar orang.

Berita menurut F. Fraser Bond (1982:24) adalah laporan tentang sesuatu yang memperhatikan kemanusiaan dan disampaikan tepat waktunya artinya jarak antara terjadinya peristiwa dengan terbitnya berita di surat kabar relatif tidak jauh.

Mochtar Lubis (1985:11) menyatakan bahwa berita adalah laporan yang benar dan pada waktunya dari sesuatu yang terjadi, pendapat-pendapat, pikiran-pikiran, dan apa saja yang mengenai atau menarik pembaca.

J.B. Wahyudi (1991:57) mengatakan berita merupakan peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting bagi sebagian besar khalayak, masih baru atau aktual dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik.

Dari definisi-definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa berita adalah penuturan atau laporan hangat tentang fakta atau pendapat yang menarik atau penting, atau keduanya, benar dan tidak memihak, entah karena ia luar biasa, penting dan akibatnya atau mencakup segi-segi *human interest* mengenai peristiwa-peristiwa, pendapat-pendapat, pikiran-pikiran dan sebagainya.

Mengenai Pemilu, David Robertson dalam *Dictionary of Politics* seperti dikutip Abd. Rohim Ghazali (1997:67) mengemukakan, "Pemilu secara luas bisa diartikan sebagai suatu metode pemilihan bagi beberapa pemimpin dalam pos-pos atau

perkantoran dan menjadi satu-satunya metode yang diakui dalam pemilihan pimpinan politik atau gubernur di seluruh dunia”.

M. Topan (1989:93) mengatakan bahwa “Pemilu merupakan suatu bentuk kegiatan politik yang melibatkan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia dalam proses pembentukan sarana-sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat”.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa berita pemilu adalah laporan hangat berisi fakta yang bersifat aktual, umum dan akurat mengenai pemilihan pemimpin politik beserta metode yang diterapkan, dimana pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Menurut Dja'far H. Assegaff (1991:40) mengemukakan, berita politik dalam arti sempit hanya sebatas partai dan kegiatannya, dalam arti luas berita politik ialah mengenai ilmu pemerintahan negara, mencakup masalah-masalah kenegaraan, sejak dari diplomasi internasional, pemilihan umum, dan krisis-krisis kabinet sampai masalah politik yang timbul di daerah-daerah.

Lebih lanjut, Dja'far H. Assegaff (1991:41), “... pemberitaan politik adalah pada saat-saat terjadinya krisis kabinet, pemilihan umum baik untuk DPR atau badan-badan legislatif lainnya, maupun pemilihan presiden”.

Berdasarkan permasalahan yang dicakupnya, berita Pemilu termasuk dalam berita politik.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai berita Pemilu Presiden Putaran Kedua yang terdapat di Surat kabar Rakyat Merdeka.

Pengertian dari Pemilu Presiden Putaran Kedua yaitu pemilihan presiden yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih Capres yakni Megawati Soekarnoputri atau Susilo Bambang Yudhoyono untuk kali kedua yang diselenggarakan tanggal 20 September 2004.

Berita yang menjadi penelitian penulis adalah berita politik mengenai pemilihan presiden.

Jadi, Berita Pemilihan Presiden Putaran Kedua adalah penuturan atau laporan hangat tentang fakta atau pendapat yang menarik atau penting, atau keduanya, benar dan tidak memihak mengenai pemilihan presiden yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih Capres yakni Megawati Soekarnoputri atau Susilo Bambang Yudhoyono untuk kali kedua yang diselenggarakan tanggal 20 September 2004.

3. Obyektivitas Berita

Mengenai pelaporan obyektif dikemukakan oleh Jake Lule (1997:92), ia mengatakan:

Pada abad ke-19, di dunia barat, obyektivitas dibantu oleh berbagai unsur ekonomis. Kantor-kantor berita diciptakan lalu diupayakan kerjasama mengumpulkan berita. Disinilah obyektivitas menjadi penting, dalam rangka memenuhi aneka ragam aliran politik dan agama yang menjadi langganan kantor berita. Karena itu laporan-laporan obyektif menjadi keharusan ekonomis. Strategi yang didasarkan pertimbangan ekonomis ini dirasionalisasikan menjadi ukuran kecakapan profesional dan ideologi tanggung jawab profesional.

William L. Rivers (1994:104) mengutip James Boylan, dalam buku *Etika Media Massa, dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya* mengemukakan tentang obyektivitas:

Obyektivitas secara bertahap semakin dimengerti bukan hanya sebagai gaya penulisan berita impersonal “yang berimbang” (yang sudah terasa menjenuhkan di dalam ruangan penulisan berita), melainkan juga (harus dilihat sebagai) mewakili tuntutan jurnalisme yang lebih luas bagi posisinya di dalam masyarakat yakni sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, pihak yang berbicara demi kepentingan umum.

Terkait dengan obyektivitas, Mitchelle V. Charnley (1979:26) mengemukakan, “Objectivity in news is one important principles of modern journalism. Objectivity means that the news comes to the consumer untainted by any personal bias or outside influence that would make it appear anything but what it is.”

Terjemah pendapat di atas, yaitu: “Obyektivitas dalam berita merupakan suatu prinsip terpenting dalam jurnalisme modern. Obyektivitas berarti berita yang disampaikan harus bebas dari prasangka pribadi atau pengaruh dari luar, yang dapat menimbulkan hal-hal yang ada diluar pemberitaan.”

Masih mengenai obyektivitas, Richard L. Johannesen (1996:213) dalam bukunya *Etika Komunikasi*, mengutip Jorgen Westerthall, yang mengatakan obyektivitas adalah, “Faktualitas, termasuk kejujuran dan relevansi, dan ketidakpastian, termasuk keseimbangan/non partisipan, dan penyajian secara netral”.

Lebih lanjut, Richard (1996:214) mengutip Donald Mc. Donald menganjurkan, obyektivitas sebagaimana dianjurkan Komisi Hutchins tentang kebebasan Pers, Tahun 1974, yang dikutip Richard sebagai “...laporan yang jujur, menyeluruh, dan cerdas tentang kejadian sehari-hari dalam konteks yang memberinya makna. Pendapat lain melukiskan obyektivitas sebagai suatu sikap, sebagai upaya yang sungguh-sungguh dan sadar untuk menjadi faktual, tidak bias, seimbang dan layak”.

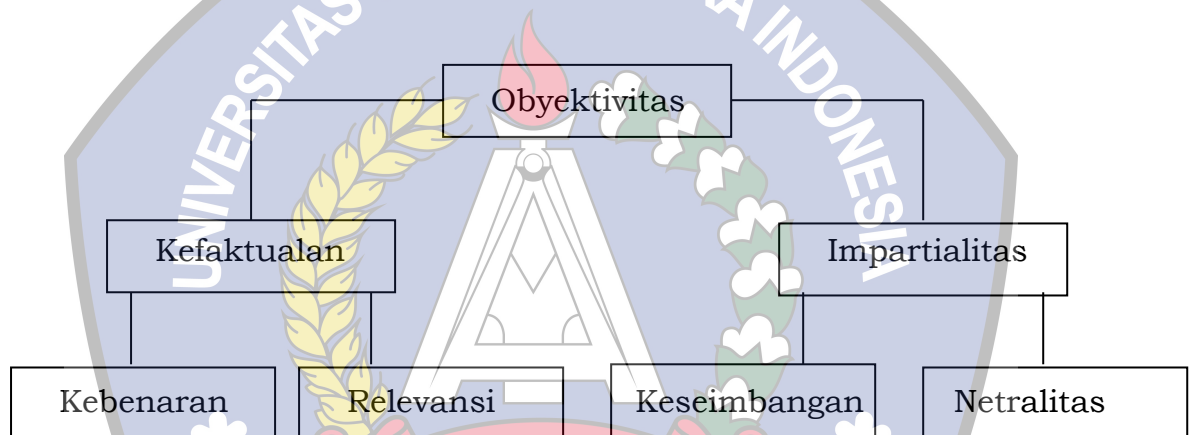
Dennis McQuail (1994:129) mengemukakan tentang obyektivitas dalam Teori Obyektivitas dan Kualitas Informasi sebagai berikut:

Makna prinsip obyektivitas berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu prinsip tersebut mengandung sekian banyak pengertian, antara lain: obyektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para wartawan sendiri; prinsip itu sangat dihargai dalam kebudayaan modern, termasuk dalam berbagai bidang di luar

bidang media massa, terutama dalam kaitannya dengan rasionalitas ilmu pengetahuan dan birokrasi.

Demikian pula J. Westerstahl yang dikutip Dennis McQuail (1994:130) memberikan komponen prinsip obyektivitas dalam bentuk skema seperti dibawah ini:

Komponen Utama Obyektivitas Berita



Bagan 1

Dari skema di atas, penulis dapat memahami bahwa obyektivitas berkaitan dengan dua komponen utama, yaitu Kefaktualan dan Impartialitas. Kefaktualan dapat dicapai melalui pemenuhan unsur kebenaran dan relevansi dalam berita. Sedangkan, Impartialitas (tidak berat sebelah) dapat diwujudkan bila telah terpenuhinya dua unsur yaitu keseimbangan dan netralitas.

Berkaitan dengan unsur-unsur dari dua komponen utama yang terdapat dalam pemenuhan keobyektivitasan berita, penulis menguraikan sebagai berikut:

Unsur pertama yaitu kebenaran, menurut Dennis McQuail (1994:130) ada beberapa kriteria kebenaran, yaitu “Keutuhan laporan, ketepatan yang ditopang oleh pertimbangan independen dan tidak adanya keinginan untuk menyalaharakan atau menekan.”

Penulis memahami bahwa berita dikatakan memiliki unsur kebenaran, jika kriteria tersebut tetap utuh dan tidak disalaharakan, yang berarti mengutamakan keakurasian dalam penulisan beritanya.

Menurut Walter Lippman, seperti dikutip Bill Kovach (2001:42) dalam bukunya *Sembilan Elemen Jurnalisme* mengatakan, “Fungsi kebenaran adalah menerangi fakta-fakta tersembunyi, menghubungkannya satu sama lain, dan membuat sebuah gambaran realitas yang dari sini orang bisa bertindak”.

Mengenai hal ini Bill Kovach (2001:38) berpendapat, “...kebenaran menciptakan rasa aman yang tumbuh dari kesadaran seseorang dan kebenaran inilah yang jadi intisari berita”.

Selain itu Bill Kovach (2001:46) mengutip pendapat Jack Fuller dalam buku *News Values* menjelaskan, “bahwa ada dua ujian bagi ihwal kebenaran menurut para filsuf. Yang satu

kesesuaian (*correspondence*). Yang lainnya konsistensi yang masuk akal (*coherence*). Bagi jurnalisme, hal ini secara kasar diterjemahkan menjadi memberikan fakta tanpa melenceng dan membuat fakta itu masuk akal”.

Penulis berkesimpulan bahwa kebenaran merupakan intisari dari berita, yang memberitakan fakta tanpa melenceng dan membuat fakta itu masuk akal, berfungsi untuk menerangi fakta-fakta tersembunyi serta menghubungkannya satu sama lain.

Unsur kedua adalah relevansi. Terkait dengan relevansi Denis McQuail (1994:130) berpendapat, “Pada dasarnya relevansi sama pentingnya dengan kebenaran dan berkenaan dengan proses seleksi, bukannya dengan bentuk atau penyajian”.

Dari pendapat di atas, penulis memahami bahwa relevansi berkaitan dengan proses seleksi dalam berita. Melalui proses seleksi tersebut, maka suatu berita layak atau tidak disiarkan adalah mengandung minimal satu atau beberapa unsur nilai berita.

Mengenai nilai berita (*news value*), Ashadi Siregar (1982:12) mengemukakan sebagai berikut:

1. *Significance* (penting), yaitu kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang punya akibat terhadap kehidupan pembaca.

2. *Magnitude* (besar), yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik buat pembacanya.
3. *Timeless* (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal baru terjadi, atau baru diketemukan.
4. *Proximity* (dekat), yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional.
5. *Prominence* (tenar), yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca.
6. *Human Interest* (manusiawi), yaitu kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa

Unsur ketiga dari obyektivitas adalah keseimbangan.

Menurut Mitchelle V. Charney (1979:25), "Balance is matters of emphasis and completeness. As the readers or listener's representative, the reporter must constantly strive give each fact proper emphasis, to put in proper relation to every other fact and established its relative importance to the meaning of the story as a whole".

Penulis menerjemahkan sebagai berikut: "Penekanan dan kelengkapan merupakan pokok yang menimbulkan keseimbangan. Sebagai perantara pembaca atau pendengar, reporter harus secara terus menerus berusaha untuk memberikan penekanan yang layak terhadap setiap fakta dan membangun cerita sebagai suatu keseluruhan".

Penulis memahami bahwa keseimbangan berita dapat terpenuhi bila setiap wartawan dalam penulisan beritanya

memberikan bagian yang sama pada setiap fakta (proporsional), tanpa ada kecenderungan mengurangi atau menambahkan fakta dengan suatu maksud tertentu.

Ana Nadya Abrar dalam buku *Panduan buat Pers Indonesia* mengutip Stephen Klaidman dan Tom L. Beauchamp mengatakan, salah satu kemampuan profesional yang harus dimiliki wartawan adalah kemampuan untuk menghadirkan fakta yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Sedangkan mengenai hal ini Bill Kovach (2001:51) berpendapat, “Menyeimbangkan berita dengan bersikap adil terhadap dua pihak mungkin tak mungkin tak akan menciptakan keadilan terhadap kebenaran, jika kedua pihak dalam kenyataannya tak memiliki bobot yang setara”.

Penulis memahami bahwa wartawan harus mampu untuk menghadirkan fakta-fakta yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda (*cover both side*), serta memberikan bobot yang setara atas semua fakta yang terkait dengan objek berita, sehingga akan tercipta keadilan dalam penulisan berita.

Unsur keempat adalah netralitas, menurut Dennis McQuail (1994:130), “Netralisir adalah suatu sikap yang menjauhkan setiap penilaian pribadi dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan”.

Terkait dengan hal ini, Bill Kovach (2001:59) menjelaskan, “Pengumpulan berita tidaklah seperti pegawai perusahaan lain. Mereka punya kewajiban sosial yang sesekali bisa benar-benar berseberangan dengan kepentingan utama majikan mereka, sekalipun di sisi lain, kewajiban ini justru merupakan tambang emas si majikan. Kesetiaan kepada warga ini adalah makna dari yang kita sebut independensi jurnalistik”.

Penulis memahami independensi (ketidakberpihakan) merupakan bentuk kesetiaan kepada warga yang sesekali bisa benar-benar berseberangan dengan kepentingan utama pengelolaan media/majikan.

Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press dan Committee of Concerned Journalists seperti dikutip Bill Kovach (2001:59-69), lebih dari 80 persen responden menempatkan “kewajiban pertama adalah kepada pembaca/pendengar/pemirsa” sebagai “prinsip inti jurnalisme”.

Sedangkan menurut Kode etik organisasi *American Society of Newspaper Editors* dalam buku *Sembilan Elemen Jurnalisme* karya Bill Kovach (2001:61-62), “Independence: Freedom from all obligations except that fidelity to the public interest is vital (Independensi: bebas dari semua kewajiban, kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik, adalah vital”.

Dari seluruh definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa netralitas atau independensi merupakan suatu sikap yang menjauhkan setiap penilaian pribadi dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan dan mengutamakan kesetiaan kepada warga/pembaca, karena hal itu adalah vital. Walaupun sesekali bisa benar-benar berseberangan dengan kepentingan utama pengelola media.

B. **Kategori dan Definisi Kategori**

Kategori penelitian ini adalah **Obyektivitas**. Definisi Kategori, sebagai berikut:

1. Kebenaran

Berita tersebut harus akurat, berarti segala fakta yang ditulis adalah benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyebutan sumber berita yang jelas, baik peristiwa atau pendapat. Artinya, jika wartawan menulis berita peristiwa, maka disebutkan dengan jelas peristiwanya, seperti kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa peristiwa itu terjadi. Sedangkan, jika berita tersebut berasal dari pendapat manusia maka disebutkan dengan jelas identitas sumber berita yang mengemukakan pendapat tersebut. Jika memang tidak ingin disebutkan namanya, dapat diganti dengan “sumber yang dipercaya” atau “pihak yang bersangkutan”, sehingga tidak

ada fakta pendapat yang berdiri sendiri tanpa ada sumber beritanya.

2. Relevansi

Berita yang layak untuk disiarkan minimal harus memenuhi setidaknya satu dari enam syarat nilai berita, yaitu:

- *Significance* (penting), kejadian yang kemungkinan mempengaruhi orang banyak, atau kejadian yang punya akibat terhadap kehidupan pembaca. Misalnya, berita mengenai pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, merupakan peristiwa penting bagi masyarakat Indonesia, Karena akan berakibat terhadap perubahan kehidupan pembaca.
- *Magnitude* (besar), kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak. Bisa dilihat berdasarkan wilayah dari berita itu. Contoh, berita mengenai kampanye kedua Capres di seluruh wilayah di Indonesia, hal ini menjadi besar karena jangkauannya nasional. Selain itu juga bisa berdasarkan angka-angka, seperti berita mengenai jumlah pemilih pada pemilu putaran kedua yang jumlahnya lebih dari 100 juta orang. Menjadi besar karena jumlahnya banyak dan berarti bagi kehidupan orang banyak

- *Timeliness* (waktu), kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru ditemukan. Artinya, berita tersebut disajikan pada hari yang sama atau paling tidak satu hari setelah peristiwa itu terjadi.
- *Proximity* (dekat), kejadian yang dekat dengan pembaca, bisa bersifat geografis ataupun emosional. Dapat dilihat dengan dimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana jaraknya dengan pembaca. Sebagai contoh, jika peristiwa itu terjadi di kediaman SBY di Cikeas, maka secara geografis dekat dengan pembaca di wilayah Bogor.
- *Prominance* (tenar), kejadian yang menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca. Jika berita tersebut menyangkut nama tokoh terkemuka atau suatu organisasi yang sudah dikenal masyarakat luas.
- *Human Interest* (manusiawi), kejadian yang memberikan sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa. Jika dalam berita tersebut mengenai orang besar seperti SBY dalam suatu acara, sehingga mampu menyentuh perasaan pembaca. Contoh, kegiatan sosial yang dilakukan SBY sebagai salah satu agenda kampanye.

3. Keseimbangan

Berita tersebut harus memberikan porsi yang seimbang/bobot yang setara (proporsional pada setiap fakta yang terkait dengan obyek berita), serta memberikan fakta-fakta yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda (*cover both side*). Dapat dilakukan dengan melihat pembagian sumber berita dan fakta pada berita tersebut. Artinya jika berita mengenai kedua Capres, maka pembagian jumlah sumber berita dan fakta yang ditulis harus seimbang/proporsional, yang berasal dari kedua pihak. Selain itu, jika sumber berita tidak berasal dari kedua pihak maka sumber berita harus berasal dari orang yang bersikap netral atau independent, serta tidak memunculkan sumber berita dari salah satu pihak saja, dan dapat dilihat melalui pernyataannya.

4. Netralitas

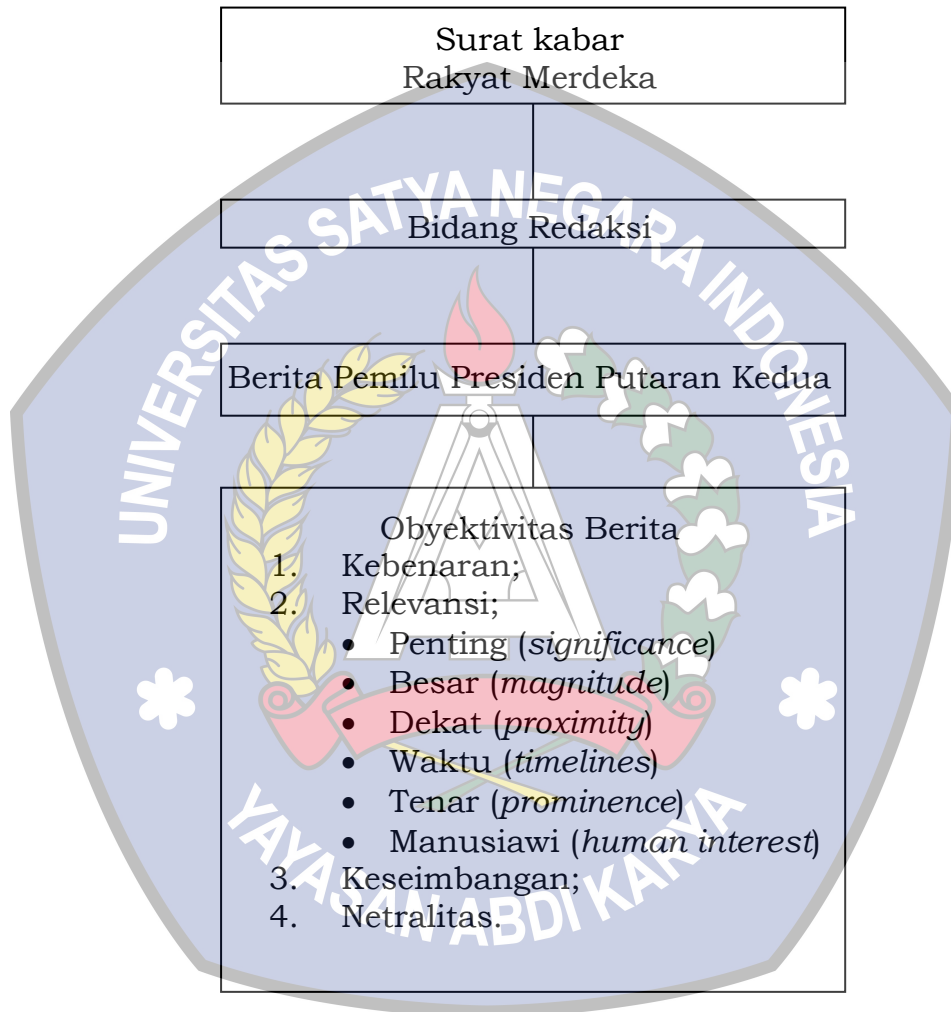
Berita tersebut tidak mengandung penilaian wartawan, apalagi yang sifatnya memihak salah satu capres. Misal, dengan membumbui/menambahi fakta yang ada berdasarkan penilaian pribadi, sehingga membuat tokoh tersebut terkesan baik atau buruk. Seperti penggunaan kata “terpopuler”, “terburuk”, “terbanyak”, dan sebagainya. Jika

terdapat kata-kata tersebut tanpa disebutkan sumber berita yang jelas, maka sifatnya memihak.



C. Kerangka Pemikiran

Dari keseluruhan pembahasan kerangka teori di atas penulis menyimpulkan sebagai kerangka pemikiran:



Bagan 2

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Berelson (1952) seperti dikutip Reed H. Blake dan Edwin O. Haroldsen (2003:169), “Analisis isi adalah teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang nyata secara obyektif, sistematis dan kuantitatif”.

Jalaluddin Rakhmat mengatakan (1998:108), “analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar ...”.

Lebih lanjut Michael H.W. (1987:48,52) berpendapat, “Analisis isi adalah suatu teknik khusus yang dikembangkan untuk mengkaji bahan-bahan rekaman untuk tujuan-tujuan penelitian. Analisis isi lebih sering dipakai untuk tujuan-tujuan perbandingan daripada untuk tujuan analisis kausal”.

Klaus Krippendorff (1991:15) mengatakan analisis isi adalah suatu teknik penulisan untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:3), Inferensi berarti “Dapat disimpulkan (ditarik kesimpulan)”.

Sedangkan arti Sahih menurut KBBI (1990:767) adalah “Sah, benar, sempurna, tiada cela (dusta, palsu).

Kelebihan analisis isi, menurut Junarto Imam Prakoso (1999:119) mengutip Berger adalah murah, gampang mendapatkan bahan, menyajikan bahan yang dapat dikualifikasikan, berkaitan dengan peristiwa kekinian atau masa lalu, unobstrusive (tidak berusaha mempengaruhi orang secara sengaja). Sebaliknya kekurangan analisis isi adalah sukar menentukan sampel yang representatif, tidak mungkin membuktikan bahwa inferensi yang dibuat berdasarkan landasan analisis ini pasti benar, kadang-kadang sukar merumuskan definisi kerja, dan tidak gampang menemukan unit pengukuran.

Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Jalaluddin Rakhmat (1997:24) mengatakan, “Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi”.

Definisi lain mengenai penelitian bersifat deskriptif dikemukakan M. Iqbal Hasan (2002:22) adalah melukiskan secara sistematis, fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara aktual dan cermat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis memahami bahwa analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk melukiskan dan memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang nyata secara obyektif, sistematis dan kuantitatif.

Jika dihubungkan dengan masalah pokok penelitian ini, penulis ingin melukiskan dan memperoleh keterangan dari isi komunikasi mengenai Obyektivitas Berita Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka mulai 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004 secara obyektif, sistematis dan kuantitatif.

B. Bahan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian ini, maka bahan penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis Surat kabar Rakyat Merdeka edisi 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004 yang berisi berita Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono.

C. Unit Analisis

Unit analisis adalah bagian terkecil dari obyek penelitian yang ingin diteliti oleh penulis. Jalaluddin Rakhmat (1998:78) berpendapat bahwa unit analisis adalah obyek penelitian/unsur-unsur populasi.

Unit analisis dari penelitian ini adalah:

- Per kalimat untuk kategori berita tidak mengandung opini wartawan.
- Per alinea untuk kategori berita menyebutkan sumber berita secara jelas dan untuk kategori relevansi.
- Per berita untuk kategori berita yang tidak memihak (*cover both side*).

Dengan meneliti per kalimat, per alinea dan per berita, penulis mengharapkan memperoleh hasil yang akurat tentang hal yang ingin penulis ketahui dari berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka mulai 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1998:78), "Populasi adalah kumpulan objek penelitian yang dapat berupa orang, organisasi, kelompok, lembaga, buku, kata-kata, surat kabar dan lain-lain.

Dalam penelitian ini disebut satuan analisis (*unit of analysis*) atau unsur-unsur populasi”.

Populasi dalam penelitian ini adalah berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka mulai 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004. Dengan tujuan mengetahui obyektivitas berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sampel menurut H. Hadarinawawi (1985:144), “Sebagian dari populasi, untuk mewakili seluruh dari populasi”.

M. Iqbal Hasan (2002:58) mendefinisikan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang bertujuan.

Purposive sampling adalah pemilihan subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasinya, demikian pendapat Sutrisno Hadi (1975:226).

Mengenai Purposive sampling dijelaskan Suharsimi Arikunto (1996:127) adalah:

Sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat menarik sampel yang besar dan jauh.

Sampel berita yang akan diteliti adalah berita utama dari berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka mulai 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian secara keseluruhan untuk dianalisis
2. Menganalisis obyektivitas berita dari sampel-sampel penelitian ini.
3. Wawancara dengan wartawan yang menulis berita atau redaktur bidang di setiap subyek penelitian.

F. Analisis Data

Pertama, penulis akan mengidentifikasi berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka mulai 1 September

2004 sampai dengan 19 September 2004 berdasarkan maksud penelitian ini.

Kedua, melakukan analisis isi terhadap seluruh sampel berita, dalam melakukan analisis ini penulis membutuhkan kategori yang telah ditetapkan penulis. Yakni, berita tidak mengandung opini wartawan, beritanya tidak memihak, sumber berita disebutkan identitasnya, dan relevansi berita yang bersangkutan.

Ketiga, hasil analisis dari keseluruhan sampel berita ditempatkan pada table induk untuk mengetahui berapa sampel berita yang mengandung dan yang tidak mengandung ketiga kategori yang ditetapkan.

Keempat, setelah mendapatkan hasil penelitian data akan dibahas secara kualitatif untuk mengetahui kedalaman isi tulisan.

G. Reliabilitas Koding/Uji Kategori

Sebagaimana telah dikemukakan, metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis isi yang sistematis dan obyektif. Untuk mencapai hal tersebut, penulis mempraktekkan reliabilitas dari kategori yang telah penulis buat. Artinya, kategori tersebut harus tepat, benar, dan mudah dipahami. Untuk itu, kategori-kategori itu akan diuji oleh pelaku koding yang disebut koder.

Roger D. Wimmer dan Joseph R. Dominick (1983:182)

mengemukakan mengenai reliabilitas (reliability) sebagai berikut:

The concept of reliability is crucial to content analysis. If a content analysis is to be objective, than its measure and procedurers must be reliable. Reliability means that repeated measurement of the same material will result in similar decision or conclusion. If the result fall achieve reliability, than something is a miss with coders. The coding instruction, the category definitions, the unit of analysis, or combination of these.

Secara bebas pendapat di atas penulis terjemahkan sebagai berikut: Konsep reliabilitas atau kepercayaan merupakan bagian yang amat penting dalam analisis isi. Jika analisis isi harus obyektif, maka ukuran-ukuran dan prosedur yang digunakan harus reliabel. Reliabilitas berarti penelitian ulang terhadap bahan yang sama akan menghasilkan keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan yang sama pula. Apabila hasil yang dicapai tidak reliabel, maka ada sesuatu yang salah pada koder, perintah-perintah pengkodean, definisi kategori, unit analisis, atau kombinasi dari hal-hal tersebut.

Dapat dipahami bahwa reliabilitas koding adalah cara untuk mengukur atau menguji definisi atau isi kategori dari bahan penelitian yang sama kepada para penguji atau koder agar hasilnya dapat dipercaya.

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas kategori yang sudah ditetapkan, penulis melakukan uji kategori pada tiga sampel dengan menggunakan bantuan dari tiga orang penguji (koder).

Hasil uji kategori tersebut akan penulis hitung berdasarkan rumus yang dikemukakan Holsti seperti dikutip Roger D. Wimmer dan Joseph R. Dominick (1987:138), yaitu:

Intercoder reliability can be calculated by several methods. Holsti (1969) reported a formula for determining the reliability of nominal data in terms of percentage of agreement:

$$\text{Reliability} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Where M is the number of coding decisions on which two coders agree, and N1 and N2 refer to the total number of coding decisions by the first and second coder, respectively. Those, if two judge a sub sample of 50 units and agree on 35 of them, the calculation is:

$$\text{Reliability} = \frac{2(35)}{50 + 50}$$

Penulis menerjemahkan dan memahami pendapat di atas secara bebas sebagai berikut: reliabilitas interkoder dapat dihitung dengan beberapa cara. Holsti (1969:140) melaporkan satu formula untuk menentukan reliabilitas jumlah data dalam ukuran persentase kesepakatan:

$$\text{Reliabilitas} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Dimana M adalah keputusan dari hasil-hasil koding yang disetujui dua penguji, dan N1 dan N2 mengacu pada keseluruhan jumlah hasil-hasil koding oleh penguji pertama dan kedua secara masing-masing. Kemudian, jika kedua penguji memeriksa suatu sub dari 50 unit dan menyetujui 35 diantaranya maka perhitungannya adalah:

$$\text{Reliabilitas} = \frac{2(35)}{50 + 50}$$

Setelah melakukan pengujian terhadap tiga koder, hasilnya dapat dibuat dalam bentuk tabel.

Berdasarkan table, penulis memperoleh hasil akhir analisis dari uji kategori berdasarkan Obyektivitas Berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono.

$$\text{CR} = \frac{3M}{N1 + N2 + N3}$$

Keterangan:

CR = Hasil akhir analisis (*Coding Reliability*)

M = Jumlah kesepakatan

N = Jumlah bahan/Sampel

Hasil tersebut apabila dibuat dalam bentuk persen maka:

$$CR = \frac{3M}{N1 + N2 + N3} \times 100 \%$$

Sebagai ketentuan untuk mengetahui apakah kategori yang telah penulis tetapkan dapat digunakan, maka penulis mengacu pada pendapat Lasswell seperti dikutip Don Michael Flourney (1989:33) yang mengatakan, “Pemberian angka yang menunjukkan kesamaan sebanyak 70 persen sampai 80% antara atau diantara pelaksana koding adalah dapat diterima sebagai kepercayaan yang memadai”.

Selain itu, Johnson dan Winn mengatakan (1976,80), “Assume that proctor is thinking of a two stage study, the first stage of which is 70 percent reliable and the second stage of which is 80% percent reliable”.

Penulis terjemahkan secara bebas sebagai berikut, pendapat yang diterima perguruan tinggi yang sesuai dengan cara berpikir ada dua tingkatan untuk menentukan reliabel tidaknya, yaitu tingkatan 70% dapat dipercaya (reliabel) dan untuk tingkatan kedua 80% dapat dipercaya (reliabel).

Untuk perkuat pendapat di atas. Lasswell seperti dikutip Ishadi Sutopo K.S (1989:81), “Nilai-nilai yang menunjukkan 70-80% kesesuaian atau kalangan pemberi koding independent, dapat diterima sebagai kepercayaan yang mencukupi.

Penulis memahami bahwa nilai yang menunjukkan 70 persen sampai 80 persen kesesuaian antara pemberi koding independent, dapat diterima sebagai kepercayaan yang mencukupi. Jika hasil penelitian penulis yang penulis lakukan sama dengan atau lebih dari 70 persen, maka berita yang diteliti adalah reliabel

Tahap-tahap pelaksanaan Uji Kategori yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Menyiapkan pengantar definisi kategori, unit analisis dan table koding.
2. Semua yang disusun dalam tahap penelitian diberikan kepada koder.
3. Hasil dari koding yang dilakukan koder dianalisis.
4. Hasil analisis menentukan teruji tidaknya kategori yang disusun.

Bila dikaitkan pengertian di atas, hasil akhir analisis uji kategori yang akan diperoleh dalam bentuk persentase, maka hal ini menunjukkan bahwa kategori Obyektivitas Berita Pemilu Presiden Putaran Kedua terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Surat kabar Rakyat Merdeka dan Harian Merdeka dalam penelitian ini reliabel atau layak dipakai dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Subyek Penelitian

A. 1. Sejarah Singkat Surat Kabar Rakyat Merdeka

Surat kabar Rakyat Merdeka terbit pertama kali sebanyak 12 halaman pada hari Kamis Pahing, 22 April 1999 atau 6 Muharram 1420 H dan beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 17, Jakarta Selatan 12210.

Sejak tanggal 17 Februari 2003 surat kabar Rakyat Merdeka memindahkan kantor redaksinya ke Gedung Graha Pena Lt. 8-9, yang beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan 12212. Surat kabar ini terbit berdasarkan SK Menpen RI No.326/SK/Menpen/SIUPP/1998 dengan perubahan pada tanggal 6 April 1999 Surat Menpen/Dirjen/PPG No. 88/Ditjen PPG/K/1999.

Selama ini ada anggapan bahwa surat kabar Rakyat Merdeka sama dengan surat kabar Merdeka. Hal ini berawal dari Logo “Merdeka” pada Rakyat Merdeka nyaris tidak berubah apabila dibandingkan dengan Logo “Merdeka” pada surat kabar Merdeka. Anggapan ini pun dikuatkan dengan adanya maklumat yang tertera pada halaman satu Rakyat Merdeka pada edisi perdananya yang berbunyi:

“Kami seluruh karyawan Merdeka dengan ini mendirikan Rakyat Merdeka yang dikelola dengan semangat jiwa merdeka. Seluruh pembaca, mitra usaha dan relasi yang selama ini menjalin hubungan baik dengan kami dimohon tetap melanjutkan hubungan ini dengan Rakyat Merdeka.” (Jakarta, 22 April 1999)

Padahal masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya. Begitu pula halnya akan menajemennya. Surat kabar Rakyat Merdeka masuk disinyalir karena adanya persamaan Logo dan warna merah pada kata “Merdeka”. Hal tersebut dilakukan karena masih adanya jiwa dan semangat BM Diah (pendiri surat kabar Rakyat Merdeka).

Pada penerbitannya yang pertama kali, Rakyat Merdeka langsung menarik perhatian pembaca. Awal kemunculan perdana surat kabar yang diterbitkan oleh PT Wahana Ekonomi Semester (WES) ini juga turut mengundang RCTI yang melihat adanya “perubahan” tersebut dengan langsung mengirimkan reporternya untuk mewawancarai Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka, Jasofi Bachtiar, yang langsung disiarkan di televisi pada hari itu juga.

Logo Rakyat Merdeka yang tertera pada halaman 1 dan 12 mengalami beberapa kali perubahan. Ketika pertamakali terbit, huruf Rakyat-nya dicetak miring. Sealing sehari kemudiana kata “Rakyat” disejajarkan kembali: Lalu, pada 29 April 1999 berubah

menjadi: Rakyat Merdeka. Kata “Merdeka” sengaja dibuat dengan huruf capital agar terlihat lebih gagah, lebih berani.

Keganjilan-keganjilan terhadap bentuk logo, terus mengalami perubahan karena dianggap belum sempurna. Suatu hari diputuskan untuk membukan sayembara pembuatan Logo Rakyat Merdeka yang dapat diikuti oleh pembaca Rakyat Merdeka. Tidak disangka, sayembara ini mendapat perhatian yang tidak diperkirakan sebelumnya. Banayaknya peserta baik dari kalangan awam sampai akademis, membuat mode logo yang terkumpul mencapai ribuan. Tim juri yang menilai logo-logo tersebut untuk kemudian dipilih menjadi Logo Rakyat Merdeka yang diinginkan terdiri dari pemimpin umum, H. Margiono, dan juri ahli, Agus Darmawan T, yang juga dikenal sebagai pemerhati seni lukis serta dari redaksi. Tak kalah dengan itu, slogan Rakyat Merdeka pun disayembarakan. Hingga pada akhirnya, tim juri memutuskan “Apinya Demokrasi Indonesia” sebagai pemenangnya. Slogan tersebut bermakna “Rakyat Merdeka ialah pemegang kedaulatan tertinggi dan Rakyat Merdeka ialah cermin tertinggi semangat kedaulatan itu.”

Seperti terlihat pada saat sekarang ini. Judul-Judul yang ada pada rakyat Merdeka sering dianggap “Sensasional” dan selali tampil dengan berita-beritanya yang keras, sehingga tak salah jika kemudian Rakyat Merdeka menempatkan dirinya sebagai surat

kabar popsisi. Oposisi disini maksudnya sebagai surat kabar yang siap mengkritik siapapun yang berkuasa kalau kebijakan-kebijakannya sangat merugikan rakyat banyak.

Hal tersebut di atas dirasa perlu dilakukan karena dalam era reformasi sekarang memang mudah untuk menerbitkan Koran. Namun, bukan hal yang gampang untuk bias menembus pasar mengingat persaingan bisnis penerbitan semakin ketat dengan banyaknya majalah, tabloid maupun koran umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Terlebih lagi muncul juga pesaing dari dunia media elektronik yang aktualitas beritanya tidak kalah dan bahkan lebih cepat disiarkan melalui jaringan televisi atau radio.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemikiran yang strategis dalam bisnis penerbitan, disamping kiat jitu untuk menembus pasar agar Koran dapat beredar setiap harinya. Untuk itu memang diperlukan kemampuan tiap-tiap individu di bagian redaksi, pracetak, percetakan, pemasaran maupaun lainnya yang saling terkait terhadap penerbitan Rakyat Merdeka.

Maka, tak salah jika pa yang telah tercermin pada Rakyat Merdeka sebagai Koran oposisi perlu dilakukan.

Perkembangan

Sampai saat ini, Rakyat Merdeka masih tetap eksis mengimandangkan dirinya sebagai surat kabar oposisi. Untuk saat ini, peredarannya lebih terfokus pada wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), Bandung, dan Lampung. Kalaupun ada beredar diluar wilayah, itu juga masih dalam jumlah yang terbatas. Kini, oplah Rakyat Merdeka mencapai 150.000 eksemplar dan bahkan pernah 210.000 eksemplar pada saat menjelang kemunduran Habibie sebagai Presiden.

Akan tetapi dalam mengarungi dunia bisnis, hingga saat ini pihak manajemen belum memutuskan untuk membuka perwakilan-perwakilan di daerah-daerah lain. Hal ini disebabkan oleh karena untuk wilayah Jabotabek pun masih banyak yang harus dibenahi, termasuk meningkatkan jumlah pelanggan Rakyat Merdeka, mengingat surat kabar ini lebih banyak di tingkat pengecer dari pada pelanggan.

Surat kabar initerbit setiap hari termasuk hari libur nasional, kecuali pada Hari Raya Idul Fitri.

Dalam usianya yang sudah mencapai empat puluh tahun ini, Rakyat Merdeka terus memperbaiki dirinya dengan menampilkan berbagai rubrik dan produk baru, antara lain PROBIS yang dikhususkan untuk para pelaku ekonomi dan bisnis, Potret dan lain sebagainya. Halaman BIBIR MER yang merupakan

halaman artis dan entertainment (hiburan) menjadi kebanggaan pula sebagai surat kabar kedua Rakyat Merdeka. Ditambah lagi dengan adanya rubrik Dewan Pengawas Rakyat (DPR) Merdeka yang merupakan opini pembaca yang terorganisir.

Memasuki awal tahun 2002 slogan “Apinya Demokrasi Indonesia” diubah menjadi “Politics News Leader” yang mengandung makna bahwa Rakyat Merdeka ingin menjadi surat kabar yang “terdepan” dalam isu-isu politik. Meski Rakyat Merdeka dikelola oleh wajah-wajah muda, tetapi para pendahulunya tidak harus lepas tangan begitu saja.

Sebagai anggota Dewan Kebijakan Redaksi, Karim Paputungan memberikan bekal atau lebih tepatnya petuah bagi para redaktur dan wartawan, yaitu “Jangan sekali-sekali menghilangkan fakta peristiwa dan fakta cerita dalam berita.”

Petuah itu dimaksudkan agar Rakyat Merdeka sebagai surat kabar oposisi tetap tampil terdepan dengan isu-isu politik, namun tanpa harus menghilangkan fakta peristiwa atau fakta cerita dalam berita.

A. 2. Struktur Organisasi Surat Kabar Rakyat Merdeka

- **Pemimpin Perusahaan:**

Kiki Iswara

- **Redaktur Eksekutif:**

Arief Gunawan, Supratman, Teguh Santosa, Usama Gumanti, Mulia Siregar, Baihaki, Nurhilal, Syahrial Nasution, Nang Haroni, Rully Syahrul, Ludin Panjaitan

- **Asisten Redaktur Eksekutif:**

Robertslim Sitopu, Sudarto, Mashuri, Charlie Samosir Barat, F. Hestyarini

- **Redaktur Khusus:**

Bondan Wirawan, Hartono Utomo, IM Soemarsono, M. Faisal Fadhil, Hari Prastowo, Ikhsanuddin, Budi Rachman Hakim

- **Reporter:**

Sujana, Amir Luthan, H. Murdifi Alfatah, Wuryanto, Alya Fatiyah, Ahmad Yuslizar, Anugrah T. Aji, Erwin Tamsal, Dolat Munthe, Ferilus Nawali, H.aryono Puji Santisa, Edi Saputra Ginting, Irwan Purwantono, Ade Efendi, Asep Gampang, Rizal Maulana Malik, Tia Mariatul Kibtia, Nuryah Sybli, Abdul Shomad, Riva Lazuardi, Ricky Handayani, Dudi Novriansah

- **Fotographer:**

Zamrie KR, Dudi Anung, Sophan Wahyudi, Bambang Eko Raspurnomo, R. Suratman

- **Dewan Kebijakan Redaksi (DKR):**

H. Karim Papatungan (Koordinator), H. Margiono, H. Jasofi Bachtiar, H. Kiki Iswara, Zaenuddin HM, Ratna Susilowati (Sekretaris)

- **Kepala Personalia Redaksi dan Litbang:**

Kartika Sari

- **Penanggung Jawab Artistik:**

Fonda Lapod

- **Grafis:**

Tapien, Asep H, Adid

- **Kepala Bagian Teknik dan Sarana Redaksi:**

M. Yusuf

- **Koordinator Pracetak:**

Fauzan Soyana

- **Lay Out:**

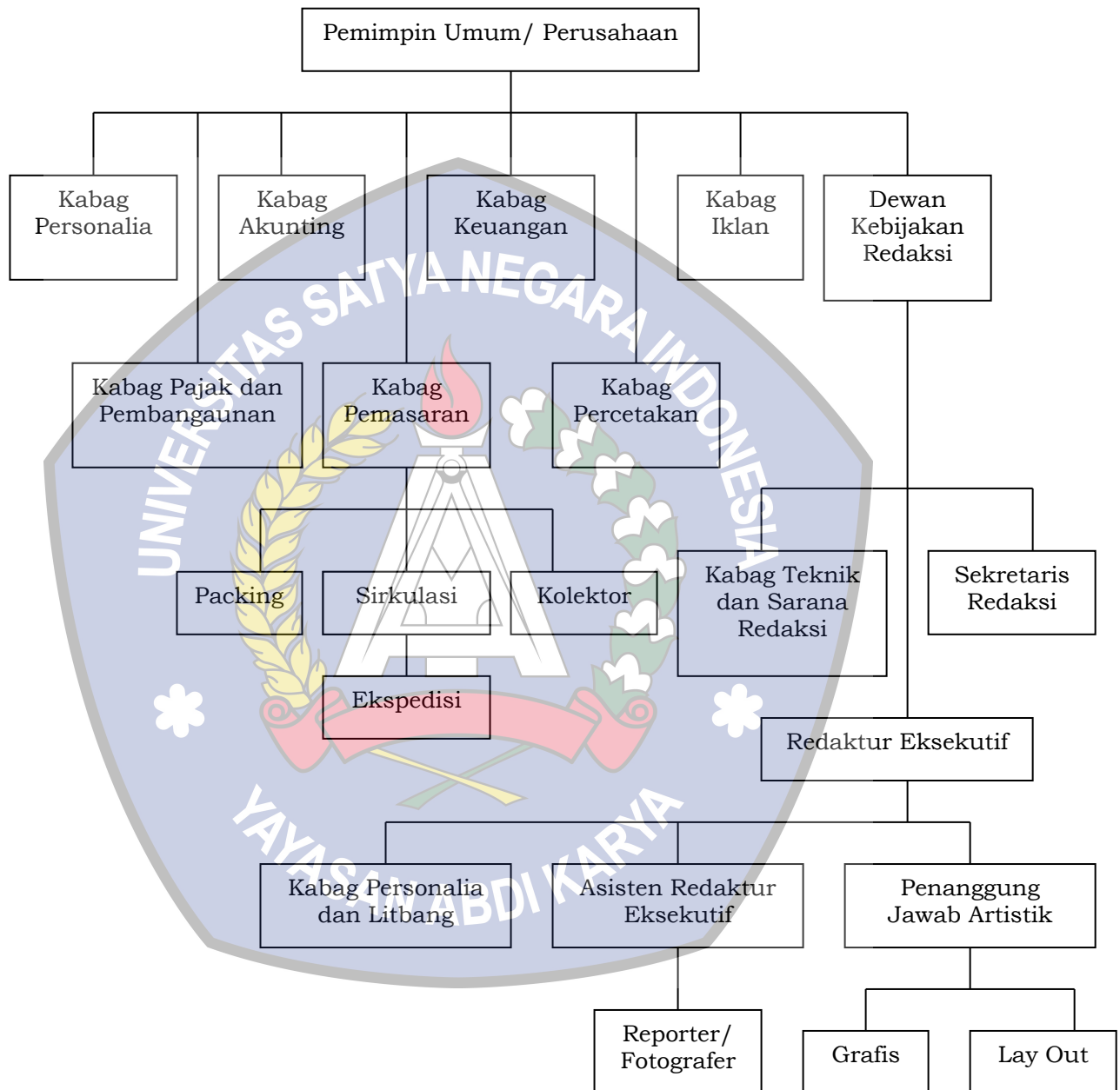
Supriyadi, Bima Arta S, Heri Santoso, Dicky, Asep Gondrong

- **Sekretaris Redaksi:**

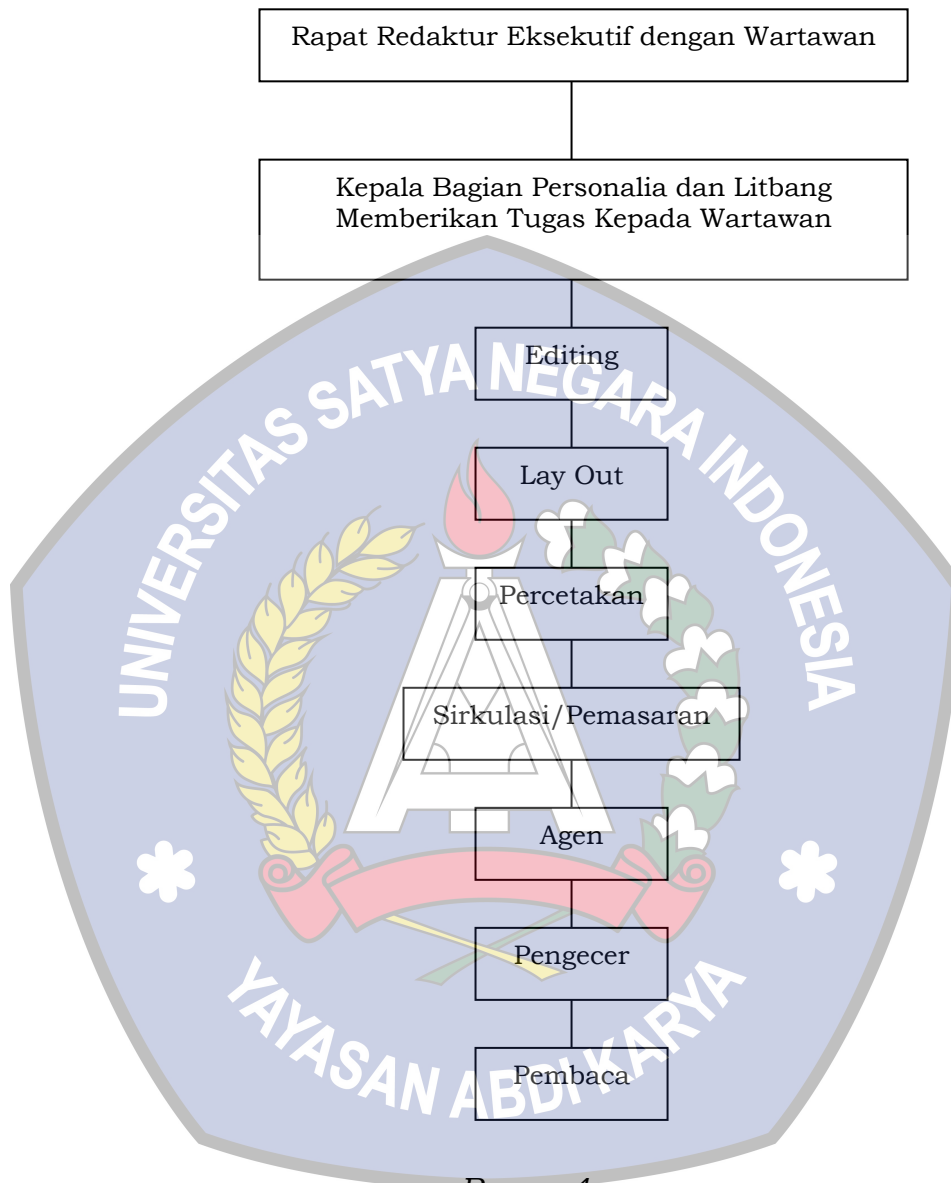
H. Endang Naedi

A. 3. Bagan Struktur Organisasi Redaksi Surat Kabar Rakyat

Merdeka



Bagan 3

A. 4. Alur Berita Surat Kabar Rakyat Merdeka

Bagan 4

Penjelasan Alur Bagan Berita

Tahap 1:

Diadakan rapat yang dihadiri oleh Redaktur Eksekutif, Koordinator Liputan dan Wartawan-wartawan pilihan yang bertanggung jawab terhadap masing-masing halaman, membahas pemberitaan yang akan diterbitkan besok.

Tahap 2:

Hasil rapat yang telah menentukan pemberitaan untuk esok hari, disampaikan Koordinator Liputan melalui Kepala Bagian Personalia dan Litbang kepada reporter yang meliput di lapangan.

Tahap 3:

Reporter lapangan meliput berita. Bahan berita yang telah dibawa reporter kemudian dibawa ke kantor untuk dijadikan naskah berita, kemudian naskah berita tersebut diberikan kepada redaktur masing-masing halaman untuk diseleksi (*editing*) layak atau tidak untuk dimuat.

Tahap 4:

Bila layak, naskah berita dikirim ke bagian Lay Out.

Tahap 5:

Naskah berita yang di Lay Out tersebut dikirim ke bagian percetakan untuk dicetak.

Tahap 6:

Berita yang telah dicetak dalam bentuk surat kabar dibawa ke bagian percetakan untuk dicetak.

Tahap 7:

Melalui Bagian Sirkulasi, surat kabar dikirim ke agen-agen besar maupun kecil yang telah menjadi pelanggan Rakyat Merdeka.

Tahap 8:

Dari agen-agen tersebut, Surat Kabar Rakyat Merdeka dikirim ke pengecer.

Tahap 9:

Pengecer menjualnya ke pembaca.



B. Hasil Analisis mengenai Obyektivitas Berita Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono mulai 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004

Sampel 1

Rabu, 1 September 2004

Soal Ajakan Berdebat dengan Megawati
Itu Kredit Poin Bagi SBY

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan
Berita ini memenuhi kategori pertama karena keseluruhan kalimat pada tiap alinea merupakan pernyataan dari sumber berita dan tidak terdapat opini wartawan.
2. Beritanya tidak memihak
Berita ini memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan yang menjelaskan sikap netral terhadap pencalonan capres-cawapres.
 - Alinea 12, kalimat 4:
Disinggung bagaimana sikapnya di final pemilu presiden, Sjahrir mengatakan, *secara institusi Partai PIB netral*, tapi menginstruksikan kepada kadernya untuk memilih salah satunya.
 - Alinea 15, kalimat 1:
Tidak etis sekarang kami mendukung.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, karena sumber beritanya jelas:

- Alinea 1, kalimat 1:

Ketua Umum Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB), Dr Sjahrir.

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1:

Ketua Umum Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB), Dr Sjahrir merasa salut terhadap *Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)* yang mengajak saingannya *Megawati Soekarnoputri* untuk *berdebat*.

Keterangan:

~ *Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)* dan *Megawati Soekarnoputri*

Nama kedua tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

~ *berdebat*

Kata di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena debat antar SBY dengan Megawati

untuk mengetahui visi, misi dan program kerja yang kemungkinan mempengaruhi orang banyak.





Sampel 2

Kamis, 2 September 2004

Telepon SBY Disadap

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini memenuhi kategori pertama karena keseluruhan kalimat pada tiap alinea merupakan pernyataan dari sumber berita dan tidak terdapat opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan yang menjelaskan sikap netral dan sumber berita bersikap independent (tidak berasal dari kubu SBY maupun kubu Megawati) terhadap pencalonan capres-cawapres.

- Alinea 2, kalimat 4:

~ *Bersaing dong secara sehat* dalam final pemilu presiden, kata pengagas Anggota DPR pro perubahan, Syaifullah Adnawi, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 1, kalimat 3:
 - ~ 52 Anggota DPR yang pro perubahan bertemu SBY dikediamannya, kawasan Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Senin (30/8) lalu.
- Alinea 2, kalimat 4:
 - ~ Anggota DPR (Komisi V) pro perubahan (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Syaifullah Adnawi.
- Alinea 5, kalimat 1:
 - ~ Pengamat Intelijen, DR AC Manullang.
- Alinea 15, kalimat 1:
 - ~ Pengamat Multimedia, Roy Suryo.

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1:

Telepon rumah dan telepon genggam *Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap.*

Keterangan:

~ *Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)*

Nama tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

~ *disadap*

Kata di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena tindakan penyadapan itu dapat menimbulkan prasangka masyarakat akan adanya kecurangan dari saingan SBY dan kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.





Sampel 3

Jum'at, 3 September 2004

Sebutan Jenderal SBY Disosialisasikan di kubu Mega-Hasyim
 “Ah, Apa Nggak Bosan, Rakyat Cuekin Tuh...”

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 1:
 - ~ Tidak ada sumber berita dan kata “*Tak bosan-bosannya*” mengandung opini wartawan.
- Alinea 4:
 - ~ Tidak ada sumber berita dan kata “*sangat tidak adil*” dan “*juga bisa*” mengandung opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan dari kubu SBY-JK serta Mega-Hasyim mengenai pencalonan capres-cawapres pada:

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Ricky Sutanto –orang dekat SBY- mengatakan, *cara seperti itu tidak merubah image SBY di mata rakyat, yakni sosok yang bisa diharapkan membawa perubahan di negeri ini.*

- Alinea 12, kalimat 1:
 - ~ Sementara Benny Pasaribu –Anggota Tim Sukses Mega-Hasyim- mengakui dikubunya memang memanggil SBY dengan sebutan Jenderal SBY.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Ricky Sutanto –orang dekat SBY
- Alinea 12, kalimat 1:
 - ~ Sementara Benny Pasaribu –Anggota Tim Sukses Mega-Hasyim-

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1:

Tak bosan-bosannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus disudutkan dengan *isu militerisme*.

Keterangan:

~ *Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)*

Nama tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

~ *isu militerisme*

Kata di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena isu tersebut ingin menggambarkan bahwa pemimpin yang berjiwa militer akan memimpin dengan gaya militer dan otoriter, hal ini dapat menimbulkan rasa khawatir dan keraguan dalam diri masyarakat dan kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.





Sampel 4

Sabtu, 4 September 2004

Dukungan Parpol di Final Pemilu Presiden
SBY 4 Lawan Mega 7 Diprediksi Menang 4

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 3:
 - ~ Tidak ada sumber berita dan kata “*memprediksikan*” dan “*memenangkan*” mengandung opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan yang menjelaskan sikap netral dan sumber berita bersikap independent (tidak berasal dari kubu SBY maupun kubu Megawati) terhadap pencalonan capres-cawapres.

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ Pengamat Politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Jayadi Nas, Pengamat Politik LIPI, Alfitra Salamm, Direktur Eksekutif *Soegeng Sarjady Syndicated* (SSS), Sukardi Rinakit dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI-*non aktif*), Denny JA berpendapat, *dukungan banyaknya*

jumlah parpol –termasuk parpol gede- tidak menjamin jagoannya itu unggul dalam pemilu Presiden 20 September mendatang.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga karena sumber beritanya jelas:

- Alinea 1, kalimat 1:

Pengamat Politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jayadi Nas, Pengamat Politik LIPI, Alfitra Salamm, Direktur Eksekutif *Soengeng Sarjady Syndicated* (SSS), Sukardi Rinakit dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI-*non aktif*), Denny JA.

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 2:

Tujuh parpol mendukung duet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, dan 4 parpol ke pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Keterangan:

~ *Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)*

Nama keempat tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

~ Kata “*Tujuh parpol*” dan “*4 parpol*”

Kata di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena jumlah dukungan parpol peserta pemilu 2004 terhadap pencalonan capres dan cawapres akan menjadi gambaran bagi masyarakat dan kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.

- Alinea 13, kalimat 2, 3, dan 4:

Sebab, dari hasil polling SSS tanggal 14-26 Agustus lalu menunjukkan SBY-JK memperoleh dukungan 41,3 persen. Sementara, Mega-Hasyim mendapat 34,68 persen. Sisanya, sekitar 24,02 persen masih belum bersikap.

Keterangan:

~ 41,3 persen, 34,68 persen, dan 24,02 persen.

Angka di atas mengandung nilai berita besar (*magnitude*) karena menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak.

- Alinea 21, kalimat 1 dan 2:

Buktinya, lanjutnya, hasil survei LSI 23-24 Agustus lalu, SBY-JK mendapat dukungan *60 persen*. Sementara Mega-Hasyim hanya *31 persen* saja.

Keterangan:

~ *60 persen* dan *31 persen*.

Angka di atas mengandung nilai berita besar (*magnitude*) karena menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak.





Sampel 5

Minggu, 5 September 2004

Sophaan Sophiaan Dukung SBY-JK

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 1:

- ~ Tidak ada sumber beritanya dan kata “*dinilai bakal dicuekin*”, “*akan ludes*”, dan “*jatah*” mengandung opini wartawan.

- Alinea 9:

- ~ Tidak ada sumber beritanya dan kata “*Kawakan*” mengandung opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan dari kubu SBY-JK, Mega-Hasyim dan sumber berita yang independent mengenai pencalonan capres-cawapres pada:

- Alinea 2, kalimat 2:

- ~ Menurutnya (Jayadi Nas), Mega sepertinya nggak memikirkan nasib kadernya, yang penting jadi presiden (lagi) periode 2004-2009.

- Alinea 21, kalimat 2:
 - ~ Makanya, saya ikut mendukung SBY-JK,” tegasnya.
(Sophan Sophiaan)

- Alinea 22, kalimat 1:
 - ~ Menanggapi hal itu, Bendahara Fraksi PDIP DPR, Irmadi Lubis mengatakan, obsesi utama PDIP adalah menjalankan amanat Kongres Semarang untuk menghantar Megawati ke istana.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Demikian pengamat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), *Jayadi Nas*
- Alinea 5, kalimat 1:
 - ~ Sementara, bekas Ketua Fraksi PDIP MPR, *Sophan Sophiaan*
- Alinea 22, kalimat 1:
 - ~ Menanggapi hal itu, Bendahara Fraksi PDIP DPR, *Irmadi Lubis*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:

Seandainya pasangan *Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi* menang di final pemilu presiden, Ketua Umum PDIP itu *dinilai bakal cuekin kadernya* untuk dijadikan menteri.

Keterangan:

~ *Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi*

Nama keempat tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

~ *dinilai bakal cuekin kadernya*

Kalimat di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena dengan adanya penilaian terhadap sikap Megawati bila terpilih menjadi presiden kembali, kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.



Sampel 6

Senin, 6 September 2004

75 Persen Mssa Golkar
Memilih SBY-Jk, Hore...

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini memenuhi kategori pertama karena keseluruhan kalimat pada tiap alinea merupakan pernyataan dari sumber berita dan tidak terdapat opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan dari kubu SBY-JK dan sumber berita yang independent, sedangkan sumber berita dari kubu Mega-Hasyim tidak ada dimintai keterangannya mengenai pencalonan capres-cawapres pada:

- Alinea 3, kalimat 3:
 - ~ Ini akibat *bekerjanya mesin politik yang tergabung dalam koalisi kebangsaan*, kata Direktur Riset LSI, Muhammad Qodari.
- Alinea 4, kalimat 1:
 - ~ Seperti diketahui, pemrakarsa FPPG, Burhanuddin Napitupulu mengatakan, pihaknya berani menjamin 80 persen pendukung dan simpatisan Partai Golkar akan *mendukung SBY-JK* di final pemilu mendatang.

- Alinea 10, kalimat 1:
 - ~ Sementara Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti menegaskan, *memang tidak akan seratus persen pendukung dan simpatisan Partai Golkar memberikan dukungan ke Mega-Hasyim.*
- Alinea 13, kalimat 1:
 - ~ Sedangkan Pengamat UI, Prof. Dr. Budyatna mengatakan, *kalau benar 75 persen massa Golkar ke SBY-JK tentu orang-orang pendukung capres Partai Demokrat itu akan bergembira, hore... .*
- 3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.
Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:
 - Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Sebab, berdasarkan hasil polling *Lembaga Survei Indonesia (LSI)*
 - Alinea 3, kalimat 3:
 - ~ Ini akibat bekerjanya mesin politik..., kata *Direktur Riset LSI, Muhammad Qodari.*
 - Alinea 4, kalimat 1:
 - ~ Seperti diketahui, *Pemrakarsa FPPG, Burhanuddin Napitupulu*

- Alinea 10, kalimat 1:
 - ~ Sementara *Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti*
- Alinea 13, kalimat 1:
 - ~ Sedangkan *Pengamat UI, Prof. Dr. Budyatna*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:

Klaim Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG) bahwa 80 persen massa partai berlambang beringan itu akan mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Keterangan:

- ~ *Klaim Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG) dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)*

Nama lembaga dan kedua tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

- ~ Kata "*mendukung*"

Kata di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena dukungan massa partai berlambang beringan itu terhadap pencalonan SBY-JK akan menjadi menimbulkan penilaian masyarakat, bahwa partai Golkar yang terpecah pada dasarnya lebih memihak pada SBY-

JK dan kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.

~ 80 persen.

Angka di atas mengandung nilai berita besar (*magnitude*) karena menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak.





Sampel 7

Selasa, 7 September 2004

Yang Penting Mampu Membuat Aman, Adil, dan Sejahtera
Dikotomi Sipil Militer, *Kuno Tuh...*

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 1:

- ~ Tidak ada sumber beritanya dan kata “*Meski rakyat sudah bersuara*”, “*masih ada saja* mengandung opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan dari kubu SBY-JK, dan sumber berita yang independent, sedangkan sumber berita dari kubu Mega-Hasyim tidak dimintai keterangannya mengenai pencalonan capres-cawapres pada:

- Alinea 2, kalimat 3:

- ~ “Yang penting, pemimpin itu nantinya mampu memberikan rasa aman, bertindak adil, dan memberikan kesejahteraan, “ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Vence Rumangkang.

- Alinea 8, kalimat 1:
 - ~ Sementara, Pengamat Politik dari *Research Institute for Democracy and Peace* (RIDEP), Ibrahim G Zakir mengatakan, *SBY tidak bisa digoyahkan* dari isu militerisme.

- Alinea 11, kalimat 1:
 - ~ Sementara, Pengamat Politik, Azrul Tanjung mengatakan, sekarang ini *para capres dan timnya* melakukan apa saja yang dianggapnya bisa menyudutkan lawan politiknya.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 3:
 - ~ “Yang penting..., ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Vence Rumangkang.

- Alinea 8, kalimat 1:
 - ~ Sementara, Pengamat Politik dari *Research Institute for Democracy and Peace* (RIDEP), Ibrahim G Zakir

Alinea 11, kalimat 1:

- ~ Sementara, Pengamat Politik, Azrul Tanjung

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:

Meski rakyat sudah bersuara –menghantarkan pasangan *Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)* unggul di pemilu presiden tahap pertama- tapi masih ada saja pihak tertentu mencuatkan *isu militerisme*, membedakan tokoh *sipil dan militer* untuk menjadi pemimpin nasional.

Keterangan

~ *Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)*

Nama kedua tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

~ Kata “*isu militerisme*”, “*sipil*”, dan “*militer*”

Kata di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena isu tersebut ingin menggambarkan bahwa pemimpin yang berjiwa militer akan memimpin dengan gaya militer dan otoriter, hal ini dapat menimbulkan rasa khawatir dan keraguan dalam diri masyarakat dan kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.



Sampel 8

Rabu, 8 September 2004

Buntut sayembara Berhadiah 'Indonesia Sukses' Rp 14,1 miliar
Mega Dipuji, SBY Dicoblos

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini memenuhi kategori pertama karena keseluruhan kalimat pada tiap alinea merupakan pernyataan dari sumber berita dan tidak terdapat opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua karena sumber berita hanya berasal dari kubu SBY-JK yang dimintai keterangannya mengenai pencalonan capres-cawapres pada:

- Alinea 2, kalimat 5:
~ Sebab *pemerintahan ini dinilai gagal*, “ujar Ketua Badan Pemenang Pemilu Pusat Partai Demokrat, H Suratto Siswodihardjo.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 5:
~ Sebab *pemerintahan ini dinilai gagal*, “ujar *Ketua Badan Pemenang Pemilu Pusat Partai Demokrat, H Suratto Siswodihardjo.*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:

Partai Demokrat mensinyalir, *sayembara* berhadiah Rp 14,1 miliar dikemas dengan judul *Indonesia Sukses sarat dengan muatan politis* untuk *mendongkrak* popularitas capres tertentu.

Keterangan:

“*Sayembara berhadiah*”, “*Indonesia sukses sarat dengan muatan politis*”, dan “*mendongkrak*”.

Kalimat di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena dengan adanya sayembara yang diduga sarat dengan muatan politis untuk mendongkrak popularitas capres tertentu kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.

~ Rp 14,1 miliar

Angka di atas mengandung nilai berita besar (*magnitude*) yaitu angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, karena menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak dalam hal ini pembaca

sekaligus pemilih yang akan mengikuti sayembara tersebut.





Sampel 9

Kamis, 9 September 2004

Utak-Atik Kiai Aziddin Soal Usia 55 Tahun
SBY Pemimpin Sempurna

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung nilai opini wartawan.

- Judul berita:
 - ~ *Utak-Atik Kiai Aziddin Soal Usia 55 Tahun SBY Pemimpin Sempurna*

Kata "*utak-atik*" mengandung opini wartawan.

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ... *dinilai* sebagai pemimpin *sempurna*.

Kata "*sempurna*" dan "*dinilai*" pada alinea 1 mengandung opini wartawan karena tidak ada sumber berita.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua karena sumber berita hanya berasal dari kubu SBY-JK yang dimintai keterangannya mengenai pencalonan capres-cawapres pada:

- Alinea 9, kalimat 4:
 - ~ Makanya *kami optimis pasangan SBY-JK bakal menjadi pemenang* dalam final pemilu presiden mendatang, paparnya.

- Alinea 12, kalimat 2:
 - ~ Dalam Rapimnas 30 Juni-1 Juli lalu, di Jakarta, telah memutuskan secara *resmi mendukung pasangan SBY-JK* menhadapi pemilu presiden.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Demikian *Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Aziddin.*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hari ini genap berusia 55 tahun (9 September 1949-9 September 2004) dinilai sebagai *pemimpin sempurna*.

Keterangan

- ~ *Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)*

Nama kedua tokoh terkemuka di atas mengandung nilai berita tenar (*prominence*).

~ “*pemimpin sempurna*”

Kalimat di atas mengandung nilai berita penting (*significance*) karena pernyataan tersebut kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden.





Sampel 10

Jum'at, 10 September 2004

Keduanya Dinilai Mengerti Masalah
Sosok SBY = Bung Karno

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 1, kalimat 1:

~ Suko Sudarso, *bekas* orang dekat Megawati Soekarnoputri dan suaminya Taufik Kiemas.

Kata "*bekas*" sebaiknya kata tersebut diganti dengan "*mantan*".

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan yang mendukung terhadap salah satu pasangan capres-cawapres.

- Alinea 7, kalimat 2:

~ Tapi kami percaya, figur alternatif seperti *SBY yang akan unggul*.

- Alinea 8, kalimat 2:

~ Saya percaya, bangsa ini akan menghargai nilai-nilai demokrasi *kalau SBY menjadi presiden*.

- Alinea 9, kalimat 2:
 - ~ Saya sih percaya bahwa *Pak SBY akan menjalankan pemerintahan penuh demokrasi.*

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ *Suko Sudarso, bekas orang dekat Megawati Soekarnoputri dan suaminya Taufik Kiemas.*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena terdapat nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ *Suko Sudarso, bekas orang dekat Megawati Soekarnoputri dan suaminya Taufik Kiemas.*

Keterangan:

- ~ *Suko Sudarso, bekas orang dekat*

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena dengan sikap Suko Sudarso memberikan dukungan terhadap SBY-JK kemungkinan mempengaruhi orang banyak, terutama calon pemilih dalam pemilu presiden berakibat terhadap

perubahan kehidupan pembaca, khususnya pendukung dari kubu Mega-Hasyim.

~ *Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas*

Nilai berita tenar (*prominance*) karena kedua tokoh sangat dikenal oleh pembaca.





Sampel 11

Sabtu, 11 September 2004

“Kubu SBY Nggak Mungkin Melakukan Itu”

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 1, kalimat 1:

~ Adanya isu *murahan* yang menyebutkan, bom ...
Megawati Soekarnoputri

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan yang mendukung terhadap salah satu pasangan capres-cawapres pada:

Alinea 8, kalimat 3 dan 4:

Tapi secara umum, popularitas SBY tetap unggul dibanding Ibu Mega. Makanya kami optimis duet SBY-JK akan memenangkan final pemilu presiden mendatang, ujanya.

Alinea 13, kalimat 2:

Yang penting bagi kami, bagaimana supaya pasangan SBY-JK bisa memenangkan pemilu presiden.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

Alinea 2, kalimat 5:

Jadi, tidak masuk akal ... papar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat Partai Demokrat, H Suratno Siswodihardjo... .

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat, sebab relevansi terpenuhi.

- Alinea 1:

~ Adanya isu murahan yang menyebutkan, bom kuningan sengaja diledakkan 11 hari menjelang final pemilu

Keterangan:

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena dampak kasus bom Kuningan terhadap pencalonan SBY-JK akan berakibat terhadap perubahan kehidupan dan penilaian pembaca dan nilai berita tenar (*prominance*) karena kedua pasangan capres-cawapres sangat dikenal oleh pembaca.

- Alinea 2:

~ Pak SBY selalu mengajarkan kami berpolitik secara santun dan baik.

Keterangan:

Berita ini mengandung nilai berita manusiawi (*human interst*), dimana kejadian ini dapat memberikan sentuhan perasaan dan emosional pembaca terhadap segala tuduhan dan adanya indikasi mengkambinghitamkan kubu SBY-JK.





Sampel 12

Minggu, 12 September 2004

Sjahrir Yakin SBY Mampu Memakmurkan Rakyat

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 1, kalimat 1 dan 3:

~ Tiba-tiba Dr Sjahrir membawa *gerbong* partainya ...
 . Ada apa *gerangan*?

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua karena dalam kalimat di bawah terdapat pernyataan yang menjelaskan dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres pada:

- Alinea 1, kalimat 1:

~ “Tiba-tiba pasangan Dr Syahrir membawa *gerbong* partainya *mendukung* pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY-JK)”.

- Alinea 3, kalimat 1:

~ “Seperti diberitakan, Partai PIB akhirnya menyatakan *dukungan* secara resmi ...”.

- Alinea 5, kalimat 1:

~ Dalam rapat partai PIB ...mendukung pasangan SBY-JK.

- Alinea 7, kalimat 1:

~ Kami percaya hanya mendukung SBY ada perubahan di negeri ini,... .

- Alinea 11, kalimat 2:

~ Makanya, mendukung SBY-JK.

- Alinea 15, kalimat 2:

~ Terus terang, kami pun mendukung SBY-JK itu tidak berambisius menjadi menteri.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 3:

~ Begitulah mayoritas ... ujar Ketua Umum Partai PBI, Dr. Syahrir.

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat

- Alinea 1, kalimat 1:

~ Tiba-tiba Dr Sjahrir membawa gerbong partainya mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena dengan memberikan dukungan kepada SBY-JK akan berakibat terhadap perubahan kehidupan pembaca, khususnya pengaruh terhadap pilihan pembaca dan nilai berita tenar (*prominance*) karena pasangan SBY-JK sangat dikenal oleh pembaca.





Sampel 13

Senin, 13 September 2004

SBY, Partai Demokrat, dan Bom

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan:

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Sedangkan 9 September 2004 akan dikenang rakyat Indonesia sebagai hari *tragis*.
Kata “tragis” mengandung opini wartawan. Sebaiknya kata tersebut diganti dengan “sejarah”.
- Alinea 3, kalimat 1:
 - ~ Makanya saat memperingati ... rasa prihatin mendalam.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua, sebab sumber berita berasal dari salah satu pihak yaitu kubu SBY-JK dan isi pernyataannya jelas mendukung pencalonan pasangan capres-wacapres tersebut.

- Alinea 17, kalimat 2 dan 3:
 - ~ Berdasarkan... *SBY-JK diperkirakan akan menjadi pemenang*. Semoga saja,... sejahtera.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 4, kalimat 2:
 ~ Banyak agenda... kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Vence Rumangkang.

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena mengandung nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1 s.d 3:
 ~ Tanggal 9 September merupakan sejarah besar bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, bekas Menko Polkam itu lahir 9 September 1949. Begitu juga Partai Demokrat yang menjagokannya sebagai capres, karena partai itu lahir 9 September 2001.

Keterangan:

Berita tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena menceritakan latar belakang pendirian Partai Demokrat dan memberikan gambaran mengenai Capres, SBY yang akan berakibat terhadap perubahan penilaian serta kehidupan pembaca dan nilai berita tenar (*prominance*) karena kedua capres sangat dikenal oleh pembaca.



Sampel 14

Selasa, 14 September 2004

Soal Sejumlah Tokoh Akan Deklarasikan Pro Perubahan
"Itu Jelas Mendukung SBY"

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini memenuhi kategori pertama karena keseluruhan kalimat pada tiap alinea merupakan pernyataan dari sumber berita dan tidak terdapat opini wartawan.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini memenuhi kategori kedua, sebab sumber berita berasal dari pengamat politik yang independent dan memiliki sikap netral dengan memberikan penilaian apa adanya tanpa memihak terhadap salah satu capres-cawapres.

- Alinea 5, kalimat 1:

~ Semua ini membuktikan, kata dia, *keinginan arus bawah untuk mengadakan perubahan* sudah tidak terbendung lagi.

- Alinea 11, kalimat 1:

~ Menurutnya, maksud gerakan yang dibangun itu positif, apalagi tujuannya untuk memberikan tekanan kepada *presiden dan wapres terpilih agar bisa memperbaiki bangsa ini*.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ Demikian *Pengamat Politik LIPI, Alfitra Salamm dan Pengamat Politik UI, Arbi Sanit.*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena mengandung nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ Adanya keinginan sejumlah tokoh -Gus Dur, Amien Rais, Rachmawati Soekarnoputri, Erros Djarot, dan Adi Sasono- hari Kamis (16/9, lusa) ...”.

Keterangan:

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena keinginan tokoh-tokoh politik di atas kemungkinan mempengaruhi penilaian pembaca, khususnya calon pemilih dan mengandung nilai berita tenar (*prominance*) karena kedua pasangan capres-cawapres sangat dikenal oleh pembaca.



Sampel 15

Rabu, 15 September 2004

Ayo Pilih Mana!

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung nilai opini wartawan.

- Alinea 2, kalimat 4:
 - ~ Banyak kalangan menilai, pemerintahan ini *gagal* melaksanakan agenda reformasi.

Kata “gagal” mengandung opini wartawan karena tidak ada pernyataan dari sumber berita.
- Alinea 3, kalimat 1:
 - ~ Seluruh isi pernyataan pada alinea ini mengandung opini wartawan karena tidak ada pernyataan sumber berita.
- Alinea 4, kalimat 1:
 - ~ Untuk itu, rakyat bawah *mendambakan* perubahan di pemerintahan mendatang.

Kata “mendambakan” mengandung opini wartawan karena tidak ada pernyataan sumber berita. Sebaiknya diganti dengan “mengharapkan”.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua, sebab sumber berita berasal dari salah satu pihak yaitu kubu SBY-JK dan isi pernyataannya jelas mendukung pencalonan pasangan capres-wacapres tersebut.

- Alinea 6, kalimat 3:
 - ~ Tapi *kami yakin*, SBY mampu mewujudkan masyarakat adil, aman, dan sejahtera.
- Alinea 8, kalimat 1:
 - ~ Suratno mengatakan, *SBY-JK itu milik bangsa*.
- Alinea 9, kalimat 4:
 - ~ Makanya *tidak ada alasan keraguan* untuk memilihnya, tutur Suratno.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 5, kalimat 1:
 - ~ Demikian *Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat Partai Demokrat, H Suratno Siswodihardjo...*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena mengandung nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:

~ “... -mencoblos pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) atau Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi- ada tip sederhana menjadi patokan”.

Keterangan:

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena dengan menjadikan tip sederhana sebagai patokan mencoblos capres dan cawapres akan berakibat terhadap perubahan kehidupan pembaca dan nilai berita tenar (*prominance*) karena kedua pasangan capres-cawapres sangat dikenal oleh pembaca.



Sampel 16

Kamis , 16 September 2004

Hasil Dialog Capres-Cawapres
Versi Dr AC Manulang dan Jayadi Nas
SBY Memuaskan, Nilai Keamanan A

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung nilai opini wartawan.

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ Penampilan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dalam dialog penajaman visi, misi dan program capres-cawapres di hari pertama (Selasa malam, 14/9) dinilai *sangat luar biasa*.

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua, sebab sumber berita berasal dari salah satu pihak yaitu kubu SBY-JK dan isi pernyataannya jelas mendukung pencalonan pasangan capres-wacapres tersebut.

- Alinea 2, kalimat 2:
 - ~ “... SBY-JK mendapatkan nilai *excellent* (sangat memuaskan), kalah dibandingkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.

- Alinea 3, kalimat 1:
 - ~ “Penampilan SBY-JK lebih unggul ketimbang Mega-Hasyim”.
- Alinea 4, kalimat 1:
 - ~ “... ada beberapa indikator kenapa SBY-JK dikatakan *excellent*”.
- Alinea 5, kalimat 1:
 - ~ “... SBY-JK yang terkait sangat memuaskan dan meyakinkan rakyat untuk memilihnya”.
- Alinea 6, kalimat 1:
 - ~ “... SBY-JK ... merupakan tokoh yang selama ini diharapkan rakyat ...”.
- Alinea 7, kalimat 1:
 - ~ “... pengamat politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Jayadi Nas, memberikan nilai tinggi kepada SBY-JK...”.
- Alinea 8, kalimat 2:
 - ~ “... bidang keamanan saya memberi nilai A karena memang SBY lebih memahami bidang tersebut...”.
- Alinea 10, kalimat 1:
 - ~ “... pasangan SBY-JK lebih berbobot dibanding pasangan Mega-Hasyim”.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Demikian *Pengamat Intelijen, DR AC Manullang...*
- Alinea 7, kalimat 1:
 - ~ Sementara *Pengamat Politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jayadi Nas.*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena mengandung nilai berita.

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Penampilan pasangan *Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)* dalam *dialog penajaman visi, misi dan program capres-cawapres* di hari pertama (Selasa, 14/9) dinilai sangat luar biasa.

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena melalui dialog ekonomi tersebut kedua pasangan capres dan cawapres dapat dinilai oleh pembaca tentang program kerja dan pemahamannya dan nilai berita tenar (*prominence*) karena sumber sangat dikenal oleh pembaca.



Sampel 17

Jum'at , 17 September 2004

Dari Dialog ekonomi Capres-Cawapres
Jualan 'Perubahan' SBY Realistis

1. Beritanya tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Judul berita:

~ *Jualan 'Perubahan' SBY Realistis*

kata, "Jualan" mengandung opini wartawan. Kata tersebut sebaiknya diganti dengan "Rencana".

- Alinea 1, kalimat 1:

~ Isu perubahan ... bukan *isapan jempol* belaka.

Kata "*Isapan jempol belaka*" mengandung opini wartawan.

Sebaiknya diganti dengan "janji saja".

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini memenuhi kategori kedua, sebab sumber berita berasal dari pengamat ekonomi yang independent dan memiliki sikap netral. Kedua sumber memberikan penilaian apa adanya tanpa memihak terhadap salah satu capres-cawapres.

- Alinea 6, kalimat 1:
 - ~ “... SBY-JK maupun Mega-Hasyim menyampaikan *hal yang normatif*, namun penilaian acara tersebut terkait dengan *penilaian kepercayaan rakyat ...*”.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ Begitu penilaian Pengamat Ekonomi dari *Institute for Development-Economic and Finance (INDEF)*, *Drajat Wibowo*, dan Pengamat Ekonomi dari *Center for Banking’Crisis (CBC)*, *Deni Daruri ...*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena mengandung nilai berita.

- Alinea 2, kalimat 1:
 - ~ “... *dialog bidang ekonomi pasangan SBY-JK dan Mega-Hasyim, ...*”.

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena melalui dialog ekonomi tersebut kedua pasangan capres dan cawapres dapat dinilai oleh pembaca tentang program kerja dan pemahamannya dan

nilai berita tenar (*prominence*) karena sumber sangat dikenal oleh pembaca.





Sampel 18

Sabtu , 18 September 2004

Iklan 'Militerisme' Farid Faqih Digugat Orangnya SBY-JK

1. Berita tidak mengandung opini wartawan

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Judul berita:

Iklan*Orangnya* SBY-JK

~ Kata "Orangnya" sebaiknya diganti dengan "Tim Sukses" atau "Kader".

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua, sebab sumber berita hanya berasal dari pihak Capres, SBY-JK. Sebaiknya, Farid faqih sebagai tergugat dimintai pendapatnya atas gugatan dari H Suratto S.

- Alinea 9, kalimat 1:

~ *Suratto menjamin*, kalau ... SBY dipercaya rakyat menjadi presiden ... membasmi setiap praktik KKN.

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga, sebab sumber beritanya jelas:

- Alinea 2, kalimat 4:
 - ~ Ini kan ... tegas, *Ketua Badan Pemenang Pemilu Pusat Partai Demokrat, H Suratto Siswodihardjo.*

4. Relevansi

Berita ini memenuhi kategori keempat karena mengandung nilai berita.

- Alinea 1, kalimat 1:
 - ~ “Iklan Koordinator Government Wacth (Gowa) Farid Faqih mengenai *ajakan jangan pilih militerisme ...*”.

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena berkemungkinan mempengaruhi orang banyak, apakah akan memilih SBY-JK atau tidak.

- ~ “*kemarin*”.

Kata *kemarin*, mengandung nilai berita waktu (*timeliness*) karena berita tersebut disajikan satu hari setelah peristiwa itu terjadi.



Sampel 19

Minggu, 19 September 2004

Hidayat Bilang PKS Tetap Solid Dukung SBY

1. Berita tidak mengandung opini wartawan.

Berita ini tidak memenuhi kategori pertama karena mengandung opini wartawan.

- Alinea 5, kalimat 1:

~ Kendati demikian, ... *membludak* dari seluruh kader-kader PKS terutama DKI,...

Kata "*membludak*" sebaiknya diganti dengan kata "*meningkat*".

2. Beritanya tidak memihak

Berita ini tidak memenuhi kategori kedua, sebab sumber berita mendukung salah satu capres.

- Judul Berita:

~ "Hidayat Bilang PKS Tetap Solid *Dukung* SBY".

3. Sumber berita harus disebutkan identitasnya.

Berita ini memenuhi kategori ketiga yaitu sumber beritanya jelas:

- Alinea 1, kalimat 1:

~ *Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menegaskan...*

4. Relevansi

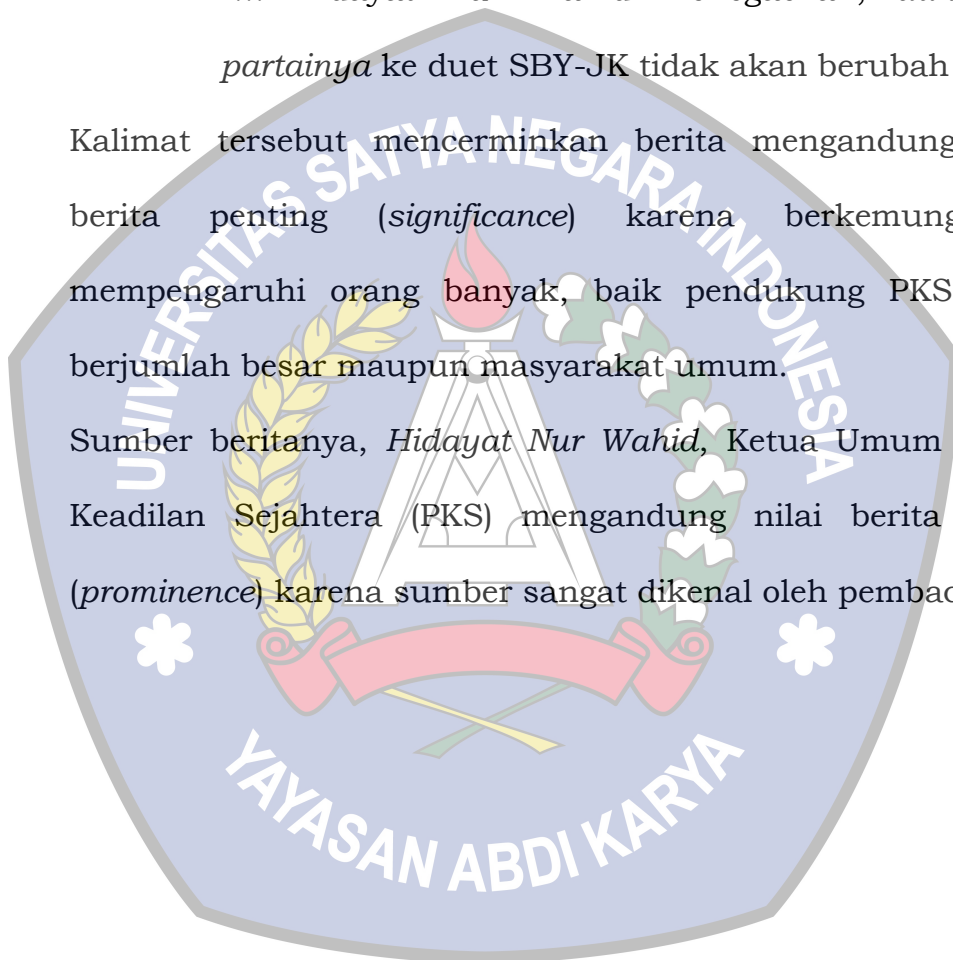
Berita ini memenuhi kategori keempat karena mengandung nilai berita.

- Alinea 1, kalimat1:

~ “... Hidayat Nur Wahid menegaskan, *dukungan partainya* ke duet SBY-JK tidak akan berubah ...”.

Kalimat tersebut mencerminkan berita mengandung nilai berita penting (*significance*) karena berkemungkinan mempengaruhi orang banyak, baik pendukung PKS yang berjumlah besar maupun masyarakat umum.

Sumber beritanya, *Hidayat Nur Wahid*, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengandung nilai berita tenar (*prominence*) karena sumber sangat dikenal oleh pembaca.





Tabel Hasil Analisis mengenai Obyektivitas Berita Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono mulai 1 September 2004 sampai dengan 19 September 2004

n = 19

Unsur Obyektivitas	Terpenuhi		Tidak terpenuhi		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%
Kebenaran	5	26.31	14	73.69	19	100
Relevansi	19	100	0	0	19	100
Keseimbangan	7	36.85	12	63.15	19	100
Netralitas	19	100	0	0	19	100

Tabel 2

Kesimpulan Tabel:

Berdasarkan table di atas, dari 19 sampel berita yang menerapkan kategori kebenaran sebanyak 5 sampel atau 26.31 % dari total sampel berita. Dan yang menerapkan kategori keseimbangan sebanyak 7 sampel atau 36.85 % dari total sampel berita. Selanjutnya, berita yang menerapkan kategori relevansi dan kategori netralitas masing-masing sebanyak 19 sampel atau 100 %.

Sedangkan dari 19 sampel berita yang tidak menerapkan kategori kebenaran sebanyak 14 sampel atau 73.69 % dari total sampel berita. Dan yang tidak menerapkan kategori keseimbangan sebanyak 12 sampel atau 63.15 % dari total sampel berita.

Selanjutnya, tidak ada berita yang tidak menerapkan kategori relevansi dan kategori netralitas .

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang memuat 19 sampel berita politik mengenai Obyektivitas Berita Pemilu Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Rakyat Merdeka, dapat diukur dengan mengetahui berita mana yang menerapkan kategori dari obyektivitas berita dan berita mana yang tidak menerapkan kategori dari obyektivitas berita tersebut.

Adapun kategori yang dimaksud adalah kebenaran, relevansi, keseimbangan, dan netralitas.

Sebanyak 19 sampel berita telah diteliti satu persatu dan tidak semua sampel berita tersebut menerapkan kategori dari variable obyektivitas.

Seperti pada sampel 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, dan 19, sampel berita-berita tersebut tidak memenuhi kategori kebenaran serta sampel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, beritanya tidak memenuhi kategori keseimbangan.

Sedangkan sampel 1, 2, 6, 8, dan 14, sampel berita-berita tersebut memenuhi kategori kebenaran serta sampel 1, 2, 3, 4, 5, 14, dan 17, beritanya memenuhi kategori keseimbangan.

Berdasarkan wawancara dengan Redaktur Eksekutif Surat kabar Rakyat Merdeka, Teguh Santosa (2005:194) bahwa tidak ada berita yang obyektif, semua berita pasti berpihak. Sedangkan yang dimaksud dengan obyektivitas berita adalah kemampuan kita melihat persoalan berdasarkan sudut pandang orang banyak dan untuk kepentingan masyarakat, serta akan bersinggungan dengan apa yang dikatakan independen. Jadi, orientasi obyektivitas itu adalah publik.

Pemahaman mengenai obyektivitas di atas berbeda dengan pendapat Kurniawan Junaedhi (1991:257) dalam Ensiklopedia Pers Nasional Indonesia mengatakan obyektivitas adalah melaporkan keadaan senyatanya, apa adanya, tanpa dipengaruhi pendapat dan analisis pribadi, lepas dari rasa perorangan, tidak memihak, tidak miring sebelah, dan hanya berhubungan dengan obyeknya.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan bahwa kami mengartikan berita memenuhi kategori kebenaran yaitu tergantung pada bagaimana wartawan membuat satu sudut pandang tanpa mengarang dengan menambahi dan mengurangi fakta yang ada.

Hal ini juga bertentangan dengan definisi obyektivitas yang diungkapkan oleh *J.B. Wahyudi* bahwa obyektivitas suatu berita yang menekankan pentingnya menuliskan berita berdasarkan fakta tanpa tercampur opini wartawan.

Sedangkan pengertian mengenai kategori keseimbangan, menurut Teguh, “konsep ini sebenarnya tidak ada, karena tidak ada berita yang tidak memihak, semua berita pasti memihak”.

Pemahaman mengenai kategori keseimbangan menurut Teguh bertentangan dengan pendapat William L. Rivers (1994:104) mengutip James Boylan, bahwa Obyektivitas secara bertahap semakin dimengerti bukan hanya sebagai gaya penulisan berita impersonal “yang berimbang” (yang sudah terasa menjenuhkan di dalam ruangan penulisan berita), melainkan juga (harus dilihat sebagai) mewakili tuntutan jurnalisme yang lebih luas bagi posisinya di dalam masyarakat yakni sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, pihak yang berbicara demi kepentingan umum.

Sedangkan pada sampel 1, 2, dan 14, sampel berita-berita tersebut telah menerapkan keempat kategori tentang obyektivitas yaitu kebenaran, relevansi, keseimbangan, dan netralitas. Hal ini sesuai dengan definisi-definisi konseptual mengenai obyektivitas yang dikemukakan para ahli.

Dari ke-19 sampel berita, baik sampel yang menerapkan obyektivitas berita ataupun tidak menerapkan obyektivitas, semua sampel berita memiliki persamaan yaitu memenuhi kategori relevansi dan netralitas. dalam setiap sampel tersebut.

Hasil analisis terhadap sampel-sampel tersebut mengandung kategori yang berbeda-beda. Dari 19 sampel berita

yang menerapkan kategori kebenaran sebanyak 5 sampel atau 26.31 % dari total sampel berita. Dan yang menerapkan kategori keseimbangan sebanyak 7 sampel atau 36.85 % dari total sampel berita. Selanjutnya, berita yang menerapkan kategori sumber relevansi dan netralitas masing-masing sebanyak 19 sampel atau 100 %.

Sedangkan dari 19 sampel berita yang tidak menerapkan kategori kebenaran sebanyak 14 sampel atau 73.69 % dari total sampel berita. Dan yang tidak menerapkan kategori keseimbangan sebanyak 12 sampel atau 63.15 % dari total sampel berita. Selanjutnya, tidak ada berita yang tidak menerapkan kategori sumber berita disebutkan identitasnya serta tidak menerapkan kategori relevansi.

Teguh Santosa mengatakan bahwa, “Kami memang anti Mega-Hasyim, maka berita yang terbitkan dalam Surat kabar Rakyat Merdeka, khususnya Rubrik “Presiden Pilihan Kita” cenderung mengenai SBY-JK, bahkan mungkin keberpihakannya hampir 100%”.

Dari seluruh sampel berita, ada 3 sampel berita yang menerapkan obyektivitas berita secara sempurna dan ada 16 sampel berita yang tidak menerapkan obyektivitas berita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, penulis menyimpulkan dari BAB I sampai dengan BAB IV secara garis besar. Pada BAB I, penulis menguraikan latar belakang masalah yang penulis teliti. Berkaitan dengan berita yang sedang hangat pada tahun 2004, banyak media massa menyajikan beritanya mengenai Pemilu Presiden Putaran Kedua tahun 2004 ini, baik itu mengenai kebaikan dan keburukan dari capres dan cawapres.

Salah satunya, Surat kabar Rakyat Merdeka yang pada 1 September sampai dengan 19 September 2004 ini banyak menyajikan beritanya Pemilu Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dengan kemasan yang tentu berbeda dari media lain. Hal ini membuat penulis ingin lebih jauh lagi mengetahui bagaimana Rakyat Merdeka menyajikan kemasan beritanya seperti yang terlihat pada sampel-sampel berita mengenai Pemilu Presiden Putaran Kedua yang penulis analisis, khususnya berkaitan dengan obyektivitas.

Selanjutnya pada BAB II, penulis mengaitkan rumusan penelitian masalah penelitian yang terdiri dari beberapa konsep atau definisi dengan tinjauan pustaka yang bersumber dari

literatur baik itu buku ataupun dari kamus komunikasi melalui para pendapat ahli komunikasi.

Adapun yang menjadi konsepnya antara lain surat kabar, berita dimana pada konsep berita inilah yang penulis anggap layak untuk diteliti yaitu pada masalah Pemilu Presiden Putaran Kedua, Rubrik serta Obyektifitas dari berita Pemilu Presiden Putaran Kedua itu sendiri.

Kemudian pada BAB III, penulis menjelaskan mengenai metode penelitian, dimana penulis menggunakan metode penelitian Analisis Isi, dengan menggunakan bahan Surat kabar Rakyat Merdeka. Penulis menggunakan berita sebagai unit analisis dalam penelitian ini, sedangkan dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasinya atau sampel yang bertujuan. Penulis menggunakan metode Analisis Isi karena metode ini penulis anggap paling layak untuk dipakai dalam meneliti Obyektifitas sebuah berita dalam surat kabar.

Selanjutnya pada BAB IV, penulis membahas mengenai sampel berita yang penulis teliti. Pada sampel berita tersebut, penulis melihat obyektivitas sebuah berita, apakah berita tersebut memenuhi kategori-kategori obyektif atau tidak. Obyektivitas perlu

dalam sebuah berita hal ini dimaksudkan agar dalam menyajikan tulisan wartawan tidak memasukan pendapat pribadinya, tidak memihak pada salah satu pihak, menjelaskan nara sumbernya serta relevansi.

Karena itu, nilai obyektif dalam berita apapun, termasuk berita Pemilu Presiden Putaran Kedua Terhadap Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono di Rakyat Merdeka harus dipenuhi. Kategori dalam menentukan obyektivitas dapat diukur jika berita tersebut memenuhi 4 (empat) kategorinya, yaitu kebenaran, relevansi, keseimbangan, dan netralitas.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan dari 19 sampel berita yang menerapkan kategori kebenaran sebanyak 5 sampel atau 26.31 % dari total sampel berita. Dan yang menerapkan kategori keseimbangan sebanyak 7 sampel atau 36.85 % dari total sampel berita. Selanjutnya, berita yang menerapkan kategori relevansi dan kategori netralitas masing-masing sebanyak 19 sampel atau 100 %.

Sedangkan dari 19 sampel berita yang tidak menerapkan kategori kebenaran sebanyak 14 sampel atau 73.69 % dari total sampel berita. Dan yang tidak menerapkan kategori keseimbangan sebanyak 12 sampel atau 63.15 % dari total sampel berita. Selanjutnya, tidak ada berita yang tidak menerapkan kategori relevansi dan kategori netralitas .

Kecenderungan pemenuhan obyektivitas berita pemilihan umum presiden putaran kedua terlihat pada relevansi dan netralitas dalam berita.

B. Saran

Meskipun Rakyat Merdeka telah menggariskan sebagai surat kabar oposisi terhadap penguasa, siapapun yang berkuasa. Alangkah baiknya jika Rakyat Merdeka juga tetap memberikan informasi seimbang serta obyektif sesuai dengan fungsi media itu sendiri yaitu sebagai pemberi informasi dan mendidik. Sehingga dengan begitu Rakyat Merdeka sebagai surat kabar yang tampil dengan isu-isu politik dapat memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat.

Dan tentunya hal itu juga sangat membantu terciptanya pandangan masyarakat yang baik terhadap Rakyat Merdeka. Karena masyarakat akan semakin kritis lagi dalam berpikir serta melakukan penilaian terhadap pemberitaannya. Apabila Rakyat Merdeka hanya menyajikan berita yang kurang obyektif dalam pemberitaannya, maka khalayak pun pada akhirnya tidak mempercayai Rakyat Merdeka sebagai surat kabar yang menjadikan dirinya penyambung lidah rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yanuar. *Dasar-Dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*. CV Angkasa Raya. Bandung. 1992.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996.
- Assegaff, H. Dja'far. *Jurnalistik Masa Kini-Pengantar Ke Praktek Kewartawanan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1991.
- Blake, Reed H. dan Edwin O. Haroldsen. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Alih Bahasa: Hasan Bahanan. Papyrus Surabaya. September 2003.
- Bond, F. Fraser. *Pengantar Jurnalistik*. Terjemahan: Kustandi Suhandang. PT Karya Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.
- Charnley, Mitchell V. *Reporting*. Holt, Rinerhart and Winston Inc. Toronto. London. 1979.
- Djawoto. *Djurnalistik Dalam Praktek*. Djajasan Kantor Berita Antara. Tjetakan kedua. 1961.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- _____. *Ilmu Komunikasi-Teori Dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Cetakan XVII. 2003.
- Eriyanto. *Analisis Wacana-Pengantar Analisa Teks Media*. LKIS Yogyakarta. Cetakan I: April 2001.
- _____. *Analisis Framing-Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS. Yogyakarta. Cetakan I: Oktober 2002.
- Feliza. *Tanya Jawab Pers Indonesia*. Armico. Bandung. 1992.
- Ghazali, Abd. Rahim. *Pemilu, Budaya Politik dan Demokratisasi*. Afkar. Edisi Vol. IV No.2. 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Statistik 2*. Andi Offset. Yogyakarta. 1975.

- Hadarinawawi, H. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1985.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Hester, Albert L. *Pedoman Untuk Wawancara*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997.
- Holsti, Ole R, Content. *Analisis For The Social Sciences and Humanities*. Reading Massachusetts-Addison Westley Publishing Company. 1969.
- Irawan, Riyanti dan Teguh Meinanda. *Tanya Jawab Dasar-Dasar Jurnalistik*. Bandung. 1981.
- Johannesen, Richard I. *Etika Komunikasi*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. 1996.
- Johnson, Ross H. and Paul R. Winn. *Quantitative Methods for Management*. Houghton Mifflin Company, Boston. 1976.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi-Pengantar Teori dan Metodelogi*. Terjemahan: Farid Wajidi. CV Rajawali. Jakarta. 1991.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstie. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Alih Bahasa: Yusi A. Pareanom. Yayasan Pantau. Jakarta. 2001.
- Lubis, Mochtar. *Pers dan Wartawan*. Balai Pustaka. Jakarta. 1985.
- McQuail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa-Suatu Pengantar*. Alih Bahasa: Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Erlangga. Edisi Kedua. Jakarta. 1994.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metodelogi Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Karya. Bandung. 1998.
- Rivers, William L. dan Cleve Mathews. *Etika Media Massa, dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya*. Terjemahan: Arwah Setiawan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1994.
- Siregar, Ashadi, dkk. *Bagaimana Menjadi Penulis Media Massa (paket 4)*. PT Karya Unipress. Jakarta. 1982.

- Sitanggang, F. *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Reformasi*. Sinar Harapan. Jakarta. 1999.
- Stiftung, Friedrich. *Politik dan Radio: Buku Pegangan Bagi Jurnalis Radio*. Sembrani Aksara Nusantara. 2000.
- Soehoet, A.M. Hoeta. *Asal Mula Surat Kabar*. STP Press. Jakarta. 1982.
- _____. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Yayasan Kampus Tercinta-IISIP. Jakarta. 2003.
- _____. *Hubungan Saling Mempengaruhi Antara Pemerintah dan Masyarakat*. STP Press. Jakarta. 1986.
- _____. *Media Komunikasi*. Yayasan Kampus Tercinta-IISIP. Jakarta. 2003.
- Sutopo, Ishadi. *Analisis Peliputan Berita Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1989.
- Tambunan, E. H. *Dasar-Dasar Penelitian Berita dan Tehnik Mengarang*. Patco. Bandung. 1977.
- Tim Sekretariat Redaksi Rakyat Merdeka. "Ini Ceritanya Kapan "Rakyat Merdeka" Mulai Terbit". Jakarta. 20 April 2001.
- Topan, M. *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikasi*. Sinar Grafika. Kupang. 1989.
- Trimansyah, Bambang. *Jurnalistik Untuk Remaja*. Edisi Revisi. Impresindo. Jakarta. 1997.
- Wahyudi, J.B. *Komunikasi Jurnalistik-Pengetahuan Praktis Kewartawanan Surat kabar, Majalah, Radio dan Televisi*. Alumni. Bandung. 1991.
- Wimmer, Roger D. dan Joseph R. Dominich. *Mass Media Research An Introduction*. Wodsworth Publishing Company. Belmont. California A Division Of Wodsworth Inc. 1987.
- Wolseley, Rolland E, dan Campbell, Laurance R. *Exploring Journalism*. Pretice Hall Inc. USA. 1957.

Sumber lain

- Dedy, Djameluddin Malik. *Media dan Demokrasi, Peluang dan Tantangannya*. www.cides.or.id/publication/jurnal/sintesis/dedy.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju. Bandung. 1989.
- Eriyanto. *Obyektivitas Media: Pandangan Konstruksionis dan Positivistik*. Jurnal Pantau. ISAI. Jakarta. 2000.
- Gunadi, YS. *Himpunan Istilah Komunikasi*. PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta. 1998.
- Junaedhie, Kurniawan. *Ensiklopedia Pers Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991.
- Krisdalaksana, Harimurti. *Leksikon Komunikasi*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1990.
- Moeliono, M. Anton (et. al). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Cetakan Ketiga. Jakarta. 1990.
- PWI AJI. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Media Persindo. Yogyakarta. 2000.
- Samego, Indria. *Kebebasan Pers dan Transmisi Menuju Demokrasi Di Indonesia*. Makalah Seminar. LIPI, 8 Agustus 2000.